



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMUNIKASI DAN DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
NOMOR 53 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMUNIKASI DAN DIGITAL TAHUN 2025-2029**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMUNIKASI DAN DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029, Unit Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital perlu membuat Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Renstra Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital meliputi:
- BAB I. Pendahuluan
- BAB II. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
Kementerian/Lembaga
- BAB III. Arah Kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan
kerangka kelembagaan;
- BAB IV. Target kinerja dan kerangka pendanaan;
- BAB V. Penutup, dan
Lampiran.
- KEEMPAT : Renstra Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital untuk periode 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL



BONIFASIUS WAHYU PUDJANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Digital;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital;
4. Sekretaris Badan;
5. Para Kepala Pusat Pengembangan di lingkungan BPSDM Komdigi;
6. Ketua STMM;
7. Para Kepala Balai di lingkungan BPSDM Komdigi.



**Rencana Strategis
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) periode 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika, khususnya dalam menghadapi tantangan transformasi digital yang semakin kompleks.

Renstra ini dirancang sebagai langkah strategis BPSDM Komdigi dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045 serta Visi Komdigi untuk "Mewujudkan Transformasi Digital yang Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia". Melalui dokumen ini, BPSDM Komdigi berupaya meningkatkan kapasitas SDM digital Indonesia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan talenta digital yang berdaya saing baik ditingkat nasional maupun global.

Sebagai bagian dari Kemkomdigi, BPSDM Komdigi berkomitmen untuk mempersiapkan talenta digital yang berdaya saing melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang terstruktur dan berkesinambungan. Fokus utama kami adalah peningkatan keterampilan digital bagi berbagai segmen, termasuk ASN, masyarakat umum, dan bisnis, agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menjawab kebutuhan industri.

Kami menyadari bahwa pencapaian target yang tertuang dalam Renstra ini memerlukan kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, kami berharap dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk berkolaborasi dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat secara digital.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	6
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
1.1 Kondisi Umum	8
1.2 Potensi dan Permasalahan	27
1.3 Analisis SWOT Jangka Menengah.....	45
BAB II	47
VISI, MISI, DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMDIGI	47
2.1 Visi BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital	47
2.2 Misi BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital	48
2.3 Tujuan BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital	49
2.4 Sasaran Strategis BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital	50
BAB III	53
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	53
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	53
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komdigi	55
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPSDM Komdigi	60
3.4 Kerangka Regulasi	69
3.5 Kerangka Kelembagaan	70
BAB IV	75
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	75
4.1 Target Kinerja	75
4.2 Kerangka Pendanaan	77
BAB V	78
PENUTUP	78

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan;

Lampiran 2: Matrik Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang sah terhadap kegiatan prioritas/ proyek prioritas;

Lampiran 3: Matrik kerangka regulasi;

lampiran 4: Pohon Kinerja BPSDM Komdigi.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tingkatan <i>Skill</i> Digital	9
Gambar 1.2	Peserta Pelatihan <i>Digital Talent Scholarship</i> 2020 - 2024 per Akademi	11
Gambar 1.3	Sebaran Peserta yang Mengikuti Pelatihan <i>Digital Talent Scholarship</i> 2023 - 2024 per Provinsi	11
Gambar 1.4	Hasil Analisis Dampak Pelaksanaan Kegiatan DTS	12
Gambar 1.5	Platform Diploy	13
Gambar 1.6	Penerima Beasiswa Periode 2020 - 2024	14
Gambar 1.7	Peserta Pengenalan TIK 2020 - 2024	15
Gambar 1.8	Peserta Pelatihan Aparatur 2020 - 2024	16
Gambar 1.9	Data mahasiswa ongoing STMM sampai akhir tahun 2024	17
Gambar 1.10	Nilai IMDI tahun 2020 - 2024	19
Gambar 1.11	Nilai IMDI per pilar tahun 2022 - 2024	20
Gambar 1.12	Jumlah SKKNI 2020 - 2024	21
Gambar 1.13	Skema sertifikasi di LSP STMM	22
Gambar 1.14	Skema sertifikasi di LSP BPPTIK	23
Gambar 1.15	Proses Transformasi Ekosistem Pengembangan SDM Digital	25
Gambar 1.16	Angkatan Kerja Indonesia, 2015 - 2024	28
Gambar 1.17	Nilai Ekonomi Digital 2023 (Gross Merchandise Value)	29
Gambar 1.18	Perkembangan coverage internet 4G di Indonesia	30
Gambar 1.19	Rata-rata Kecepatan Unduh Berdasarkan Provinsi	31
Gambar 1.20	Jumlah Lulusan Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana terkait Digital (ribu orang)	32
Gambar 1.21	Perkiraan Dampak Perkembangan Teknologi terhadap Lapangan Pekerjaan periode 2023 - 2027	35
Gambar 1.22	Peringkat Keterampilan Digital Indonesia dibandingkan tetangga	37
Gambar 1.23	Perkembangan Skor EV-DCI Indonesia	38
Gambar 1.24	Kondisi Eksisting Ketersediaan Talenta Digital Indonesia	39
Gambar 1.25	Tingkat Pengangguran Talenta Digital Indonesia	40
Gambar 1.26	Proposal Biaya Pelatihan terhadap Rata-rata Pengeluaran per Kapita	42

Gambar 2.1	Kerangka Pilar Pembangunan Renstra Kemenkomdigi 2025 - 2029	47
Gambar 3.1	Prioritas Nasional 2025 - 2029	54
Gambar 3.2	Struktur Organisasi BPSDM Komdigi sesuai Permenkomdigi Nomor 1 Tahun 2025	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pilar Ekosistem Platform SDM Digital	25
Tabel 1.2	Program Utama dan Rincian Kegiatan	26
Tabel 1.3	Analisis SWOT	46
Tabel 2.1	Identifikasi Indikasi Risiko Sasaran Strategis dukungan BPSDM Komdigi	52
Tabel 4.1	Target Kinerja Kinerja Kemkomdigi 2025 - 2029 terkait BPSDM Komdigi	75
Tabel 4.2	Target Kinerja	76
Tabel 4.3	Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPSDM Komdigi 2025 - 2029 (dalam juta)	77

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan BPSDM Komdigi. Renstra berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan BPSDM Komdigi serta menunjukkan peran BPSDM Komdigi dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kemkomdigi pada periode 2025-2029. Penyusunan Renstra BPSDM Komdigi 2025-2029 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, serta Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komdigi Nomor 1 Tahun 2025. Selain itu dalam penyusunan Renstra BPSDM Komdigi juga mempertimbangan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi, sehingga dalam menentukan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra BPSDM Komdigi diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang digital.

BPSDM Komdigi sebagai unit kerja di bawah Kemkomdigi memiliki fungsi yang berkaitan dengan pengembangan SDM digital Indonesia. Pengembangan SDM digital Indonesia sendiri merupakan pilar pencapaian Visi Indonesia Digital Indonesia 2045 sebagai bagian dari transformasi digital dalam mendukung agenda transformasi ekonomi menuju Visi Indonesia Emas 2045. Fokus pada pengembangan SDM digital sendiri diwujudkan melalui penciptaan SDM digital Indonesia yang terampil dan berdaya saing melalui penguasaan teknologi dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, nilai budaya, dan norma sosial. Pengembangan SDM digital tersebut diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional yang produktif, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan tantangan global.

Dalam penyusunan Renstra berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dimana Renstra terdiri dari 5 bab dan lampiran, yaitu dalam Bab I berisikan kondisi umum dan potensi dan permasalahan, Bab II berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Bab III berisikan arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, Bab IV berisikan target kinerja dan kerangka pendanaan, Bab V Penutup dan melampirkan matrik kinerja dan pendanaan, matriks pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pendanaan lainng yang sah terhadap kegiatan prioritas/ proyek prioitas dan matrik kerangka regulasi.

1.1 Kondisi Umum

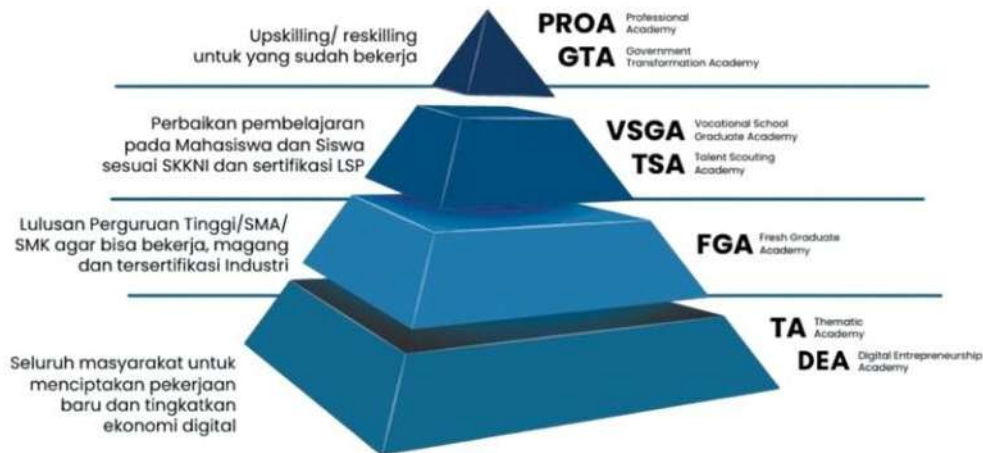
Pada periode 2020-2024 BPSDM Komdigi masih berupa Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 dan Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2021) bertanggungjawab terkait dengan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika. Kemudian pada tahun 2023 berubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika (sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023) yang bertanggungjawab terkait dengan menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informatika, dan digital. Untuk tugas penelitian semua Kementerian/Lembaga (K/L) dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kemudian pada akhir 2024 berubah menjadi BPSDM Komdigi (sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 dan Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2025).

Sebagai unit kerja di bawah Kemkomdigi, BPSDM Komdigi yang mempunyai peran strategis dalam pengembangan SDM di bidang digital. Peran tersebut dapat terlihat dalam dukungan pencapaian prioritas nasional terkait dengan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Dengan program prioritas terkait dengan transformasi digital, peningkatan produktivitas dan daya saing dan konsolidasi demokrasi.

Hal ini dapat terlihat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan BPSDM, yaitu:

- **Digital Talent Scholarship (DTS)**

Digital Talent Scholarship (DTS) merupakan program yang bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi digital serta mengurangi kesenjangan keterampilan digital di Indonesia. Program ini ditujukan bagi angkatan kerja muda Indonesia, masyarakat umum, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada periode 2020-2024 telah melakukan pelatihan kepada 652.646 peserta dengan 505.783 peserta yang mendapatkan sertifikat kelulusan. Dalam tingkatan kecakapan digital, DTS mengambil peran di level *Advanced*, *Intermediate*, dan *Basic*, yang dapat dilihat pada Gambar 1.12.



Gambar 1.1 Tingkatan Skill Digital

Sumber: LAKIP BPSDM Komdigi TA 2024

- **Digital Entrepreneurship Academy (DEA)**

Akademi DEA bertujuan untuk mendorong peningkatan keterampilan digital mulai dari dasar hingga menengah bagi calon dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ingin naik kelas dalam hal pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya.

- **Thematic Academy (TA)**

Merupakan akademi pelatihan yang ditujukan spesifik pada kalangan atau sektor tertentu. Silabus pelatihan pada akademi TA disesuaikan dengan kebutuhan target peserta yang menyasar untuk kalangan masyarakat yang belum menjadi target di 7 Akademi pelatihan lainnya seperti siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta tenaga pendidik.

- **Fresh Graduate Academy (FGA)**

Akademi pelatihan FGA bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan yang belum atau tidak sedang bekerja agar memiliki kompetensi profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui kerja sama dengan berbagai mitra seperti mitra *Edu Tech*, *Global Tech*, dan Perguruan Tinggi, akademi FGA memberikan kesempatan bagi para lulusan baru untuk memiliki sertifikasi yang dapat meningkatkan daya saing.

- **Talent Scouting Academy (TSA)**

TSA merupakan akademi pelatihan yang ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa aktif dalam mengembangkan kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di luar kampus melalui pelatihan technical skills yang berorientasi pada *project*.

- **Vocational School Graduate Academy (VSGA)**

VSGA merupakan akademi pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditunjukkan bagi lulusan SMK/ sederajat serta D-III dan D-IV yang belum bekerja dan memiliki latar belakang pendidikan di bidang *Science*, *Technology*, *Engineering*, dan *Math* (STEM).

- **Government Transformation Academy (GTA)**

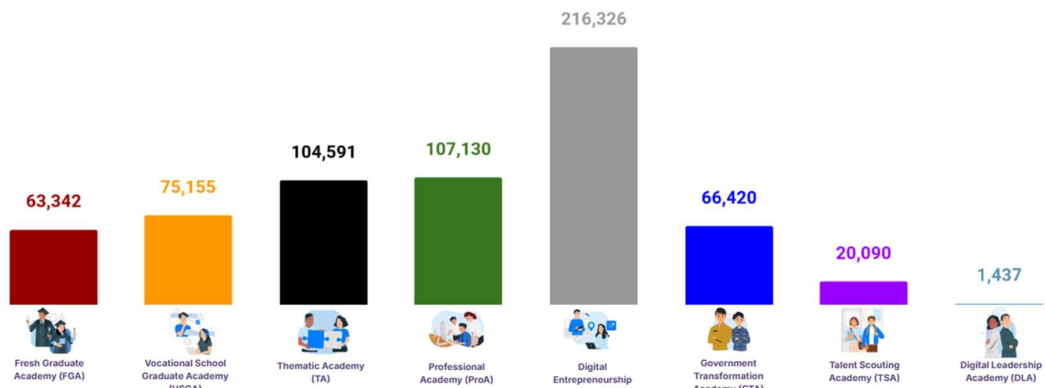
Akademi GTA merupakan program pengembangan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN, TNI, dan Polri untuk mendukung akselerasi transformasi digital di K/L/D. Sebelum bernama GTA, pada tahun 2020 akademi GTA dikenal sebagai Regional Development Academy (RDA).

- **Professional Academy (ProA)**

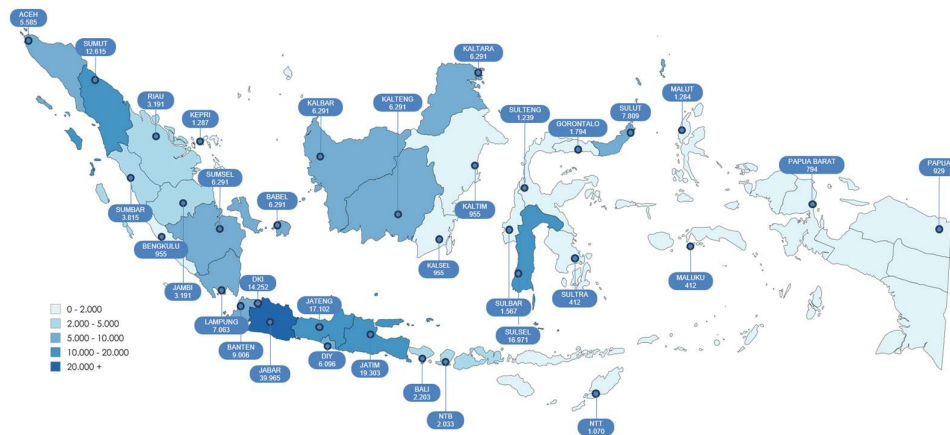
Merupakan akademi yang bertujuan untuk memfasilitasi pekerja yang ingin alih kompetensi (*reskilling*) dan meningkatkan kompetensi (*upskilling*) untuk bekerja di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pelatihan dan sertifikasi level nasional maupun global. Pada tahun 2020, akademi ProA bernama *Online Academy* (OA).

■ Digital Leadership Academy (DLA)

DLA merupakan akademi pelatihan yang menyasar kepada para pimpinan di sektor publik (K/L/D) dan sektor private (swasta) untuk meningkatkan kapasitas pimpinan dalam menginisiasi dan mendorong perubahan dalam rangka mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia.



Gambar 1.2 Peserta pelatihan *Digital Talent Scholarship* 2020-2024 per Akademi



Gambar 1.3 Sebaran Peserta yang Mengikuti Pelatihan *Digital Talent Scholarship* 2023-2024 per Provinsi

Pada tahun 2023, BPSDM Komdigi melaksanakan survei Analisis Dampak DTS untuk mengukur dampak program DTS terhadap para alumni pelatihan. Survei

dilakukan kepada 1.935 alumni DTS yang dipilih menjadi responden melalui metode *Simple Random Sampling*. Hasil survei tersebut menunjukkan 25% alumni berhasil mengalami perubahan status pekerjaan dari yang sebelumnya tidak bekerja, menjadi bekerja, serta 6% alumni yang sudah bekerja beralih untuk mempersiapkan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa program DTS memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peralihan status pekerjaan.

Sementara itu dari sisi dampak DTS terhadap perubahan penghasilan, 64,2% alumni berhasil mengalami peningkatan penghasilan. Di mana, jumlah alumni dengan penghasilan >4,5 juta meningkat dibandingkan dengan kondisi sebelum pelatihan. Oleh karena itu, program DTS telah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penghasilan alumni nya dengan rata-rata peningkatan penghasilan sebesar Rp 457.000 - Rp 549.000, atau sebesar 9,7% - 11%. Peningkatan penghasilan bagi para alumni DTS juga didukung oleh pemberian sertifikat GloTech yang memberikan dampak kenaikan penghasilan sebesar Rp 1.611.000, atau sekitar 32,3%.

Program DTS berdampak positif dan signifikan terhadap peralihan status pekerjaan¹

25%

Alumni berubah status dari tidak bekerja menjadi bekerja.

6%

Alumni yang sudah bekerja beralih untuk mempersiapkan usaha



Alumni yang berusia lebih muda berpeluang lebih tinggi untuk beralih pekerjaan²



Dibandingkan laki-laki, perempuan memiliki peluang lebih kecil untuk berganti pekerjaan²



Partisipasi dalam pelatihan ProA dan TA dapat meningkatkan peluang peserta akademi untuk mendapatkan atau beralih ke pekerjaan baru.²

¹ Berdasarkan hasil pengolahan data dengan model logistic regression.
² p<0.01

Program DTS berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penghasilan alumni DTS²

9,7% - 11%



Rata-rata penghasilan alumni DTS mengalami peningkatan sebesar Rp457.000 - Rp549.000

² p<0.01, diolah menggunakan model Mincer Wage Equation

Gambar 1.4 Hasil Analisis Dampak Pelaksanaan Kegiatan DTS

Sebagai bentuk komitmen BPSDM Komdigi dalam mendukung kesempatan berkarir bagi para lulusan pelatihan DTS, serta dalam rangka mendorong akselerasi transformasi digital, BPSDM Komdigi mengembangkan platform rekrutmen gratis yang diberi nama “Diploy”. Diploy dirancang khusus untuk memfasilitasi alumni DTS untuk memperluas dan meningkatkan kesempatan karir dengan menghubungkan mereka dengan berbagai perusahaan yang sedang mencari talenta berbakat. Saat ini, lebih dari 300 mitra dari BUMN, Swasta, Startup, dan Instansi/Lembaga Pemerintah telah bergabung ke dalam Diploy. Dengan dikembangkannya Diploy,

diharapkan akan mempermudah alumni DTS untuk mencari dan menentukan peluang berkarir yang menarik dan sesuai dengan minat dan keahlian mereka.



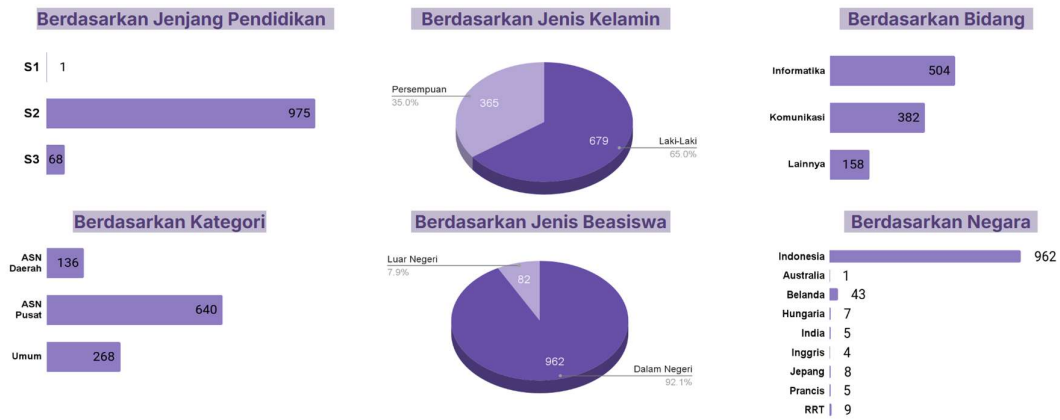
Gambar 1.5 Platform Diploy

- **Beasiswa S2/S3 bidang Komunikasi dan Informatika**

Program Beasiswa Kominfo merupakan program pemberian beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Pengembangan SDM Kominfo, yang berfokus pada pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika level middle-up (expertise) melalui pendidikan formal jenjang Magister (S2) baik dalam maupun luar negeri, jenjang Doktor (S3) untuk internal Kementerian Komdigi serta Sarjana (S1) untuk yang berprestasi di tingkat internasional dibidang komdigi (dengan persyaratan khusus). Program ini terbuka luas bagi berbagai kelompok masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan dan memperdalam keahlian dan kompetensi di bidang komunikasi dan informatika baik PNS, anggota TNI/POLRI, dan masyarakat umum yang telah bekerja.

Dalam pelaksanaan pemberian beasiswa ini bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Selama periode 2020-2024 BPSDM Komdigi telah memberikan beasiswa sebanyak 1.044 orang yang terdiri dari beasiswa Luar negeri sebanyak 82 orang dan beasiswa dalam negeri sebanyak 962 orang. Dengan tingkat kelulusan penerima beasiswa yang lulus tepat waktu sebesar 78%

Data Peserta Beasiswa Angkatan 2020 - 2024

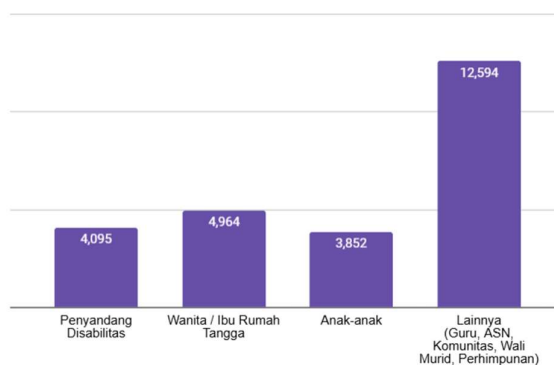


Gambar 1.6 Penerima Beasiswa periode 2020-2024

- Pengenalan TIK kepada masyarakat**

Program Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini menargetkan masyarakat umum, khususnya penyandang disabilitas, wanita/Ibu rumah tangga, dan anak-anak. Dengan adanya program ini, Kementerian Kominfo bertekad untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas, tidak tertinggal dalam era digital. Namun pada tahun 2023 dan 2024, BPSDM Kominfo melaksanakan pelatihan pengenalan TIK dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Melalui Pelatihan Pengenalan TIK, BPSDM Kominfo turut mendukung Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas.

Pada periode 2020-2024 BPSDM Komdigi telah melatih sebanyak 25.505 orang, yang terdiri dari 4.095 Penyandang Disabilitas, 4.964 Wanita / Ibu Rumah Tangga, 3.852 Anak-anak, dan 12.594 peserta Lainnya (Guru, ASN, Komunitas, Wali Murid, Perhimpunan).



Gambar 1.7 Peserta Pengenalan TIK 2020-2024

- **Pelatihan Aparatur**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 70 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan kompetensi. BPSDM Komdigi melalui Pusdiklat dan BPPTIK menyelenggarakan pelatihan khusus bagi para ASN. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 jenis pelatihan yang ditawarkan yaitu Diklat Teknis, Fungsional, dan Manajerial.

Pada periode 2020-2024 BPSDM Komdigi telah memberikan pelatihan Aparatur kepada para ASN dengan capaian 11.168 peserta.

- 1) Diklat Teknis

Diklat ini dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi teknis ASN di bidang TIK agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan profesional dalam berbagai level keahlian. Pada periode 2020-2024 BPSDM Komdigi telah melaksanakan pelatihan Diklat Teknis dengan jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 6.720 peserta dengan 6.497 peserta yang mendapatkan sertifikat kelulusan.

- 2) Diklat Fungsional

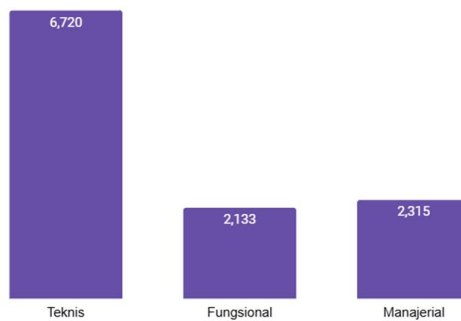
Diklat Fungsional merupakan pelatihan yang dirancang untuk mendukung para ASN dalam mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang ditetapkan. Pada periode 2020-2024 BPSDM Komdigi telah melaksanakan pelatihan Diklat Fungsional dengan jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 2.133 peserta dan 2.064 peserta yang mendapatkan sertifikat kelulusan

- 3) Diklat Manajerial

Merupakan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi ASN di bidang manajerial yang meliputi pengetahuan tentang sistem manajemen dan organisasi, dasar - dasar perencanaan, pengendalian internal, perkembangan teknologi informasi, pengambilan keputusan, manajemen konflik, komunikasi

efektif, dan kepemimpinan. Diklat Manajerial juga mencakup Diklat Latsar CPNS untuk penerimaan baru yang dilaksanakan di tahun 2024. Pada periode 2020-2024 BPSDM Komdigi telah melaksanakan pelatihan Diklat Manajerial dengan jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 2.351 peserta dan 2.295 peserta yang mendapatkan sertifikat kelulusan.

Pada periode 2020-2024, Pelatihan Aparatur ini juga turut mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (P4GN).



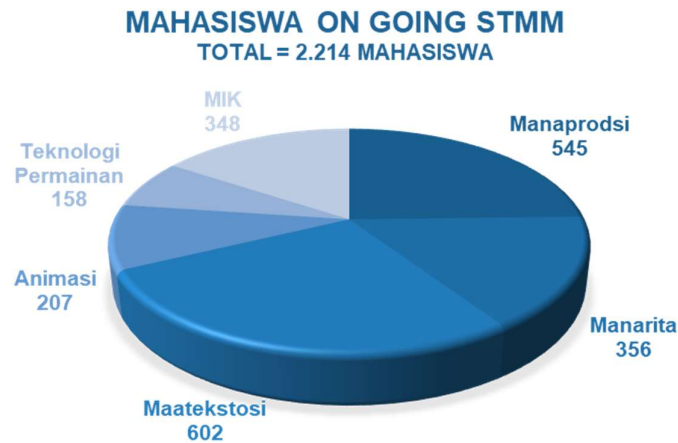
Gambar 1.8 Peserta Pelatihan Aparatur 2020-2024

- **Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Multi Media**

Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika.

Sampai saat ini Sekolah Tinggi Multi Media menyelenggarakan program pendidikan Diploma IV dan Strata I dengan 3 jurusan yaitu Penyiaran yang terdiri dari 3 program studi jenjang Diploma IV yakni Manajemen Produksi Siaran (Manaprodsi), Manajemen Produksi Pemberitaan (Manarita) dan Manajemen Teknik Studio Produksi (Matekstosi), jurusan Animasi dan Teknologi Permainan, terdiri dari 2 program studi jenjang Diploma IV yakni Animasi dan Teknologi Permainan dan Jurusan Komunikasi Informasi Publik (KIP) dengan 1 prodi S1 yakni Manajemen Informasi dan Komunikasi (MIK). Secara dukungan Sumber Daya Manusia, STMM mempunyai dosen tetap aktif sebanyak 74 orang, Tenaga Kependidikan 117 orang, dengan mahasiswa aktif sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 2.214 orang dengan rincian mahasiswa Manaprodsi sebanyak 545 orang, Manarita sebanyak 356 orang, Matekstosi sebanyak 602 orang,

Animasi sebanyak 207 orang, Teknologi Permainan sebanyak 158 orang, dan MIK sebanyak 348 orang.



Gambar 1.9 Data mahasiswa ongoing STMM sampai akhir tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah non-Kementerian mengharuskan STMM untuk bertransformasi menjadi Politeknik dengan nama Politeknik Multimedia dan Digital Indonesia (PMDI) yang rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2026 yang menyelenggarakan pendidikan vokasi sesuai dengan tugas Kemkomdigi. Saat ini proses perubahan tersebut masih dalam tahap menunggu evaluasi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.

- **Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)**

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan sebuah instrumen strategis yang dikembangkan untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital, baik dalam aktivitas keseharian maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan. IMDI dirancang sebagai bentuk respon terhadap tuntutan era transformasi digital yang semakin pesat, di mana pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengakses, menggunakan, serta mengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi faktor kunci dalam pembangunan nasional.

Sejak tahun 2022, pelaksanaan pengukuran IMDI secara rutin dilakukan oleh BPSDM Kemkominfo melalui unit kerja teknisnya, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik (Puslitbang APTIKA IKP) yang sekarang menjadi Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi. Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur untuk mencakup seluruh

wilayah administrasi di Indonesia hingga ke tingkat kabupaten/kota. IMDI mengukur tingkat literasi digital masyarakat melalui empat (4) pilar utama, yaitu:

1. **Pilar Infrastruktur dan Ekosistem**, yang mencerminkan kesetaraan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap infrastruktur digital serta lingkungan pendukung yang memadai;
2. **Pilar Keterampilan Digital**, yang menggambarkan penguasaan kemampuan dasar hingga menengah dalam pemanfaatan TIK oleh masyarakat;
3. **Pilar Pemberdayaan**, yang menilai sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan kemampuan digital secara produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka;
4. **Pilar Pekerjaan**, yang menunjukkan integrasi teknologi digital dalam sektor ketenagakerjaan dan dunia usaha, baik dari sisi kebutuhan industri maupun ketersediaan SDM digital.

Di tahun 2025, dilakukan penyesuaian pada struktur desain pengukuran IMDI. Dari keempat pilar pembentuk IMDI 2022–2024, hanya pilar keterampilan digital yang mengalami perubahan nama, sementara tiga pilar lainnya mengalami penyesuaian pada level indikator dan sub-pilar. Terhitung sejak 2025, pilar keterampilan digital disesuaikan menjadi pilar literasi digital. Pilar ini dipahami sebagai kompetensi holistik yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai dalam penggunaan teknologi digital. Dengan demikian, keempat pilar penyusun IMDI tahun 2025 mencakup:

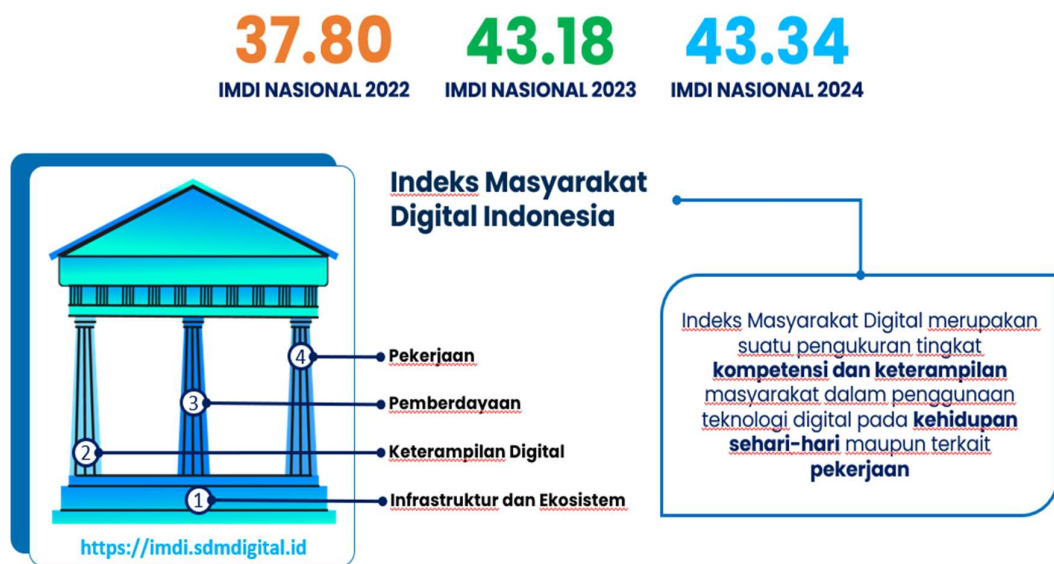
1. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem
2. Pilar Literasi Digital
3. Pilar Pemberdayaan
4. Pilar Pekerjaan.

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola transformasi digital di tingkat daerah, Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, diharapkan dapat memanfaatkan data dan hasil pengukuran IMDI sebagai referensi utama dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan sumber daya manusia di bidang digital. Pemanfaatan ini mencerminkan komitmen daerah dalam mengintegrasikan data empiris ke dalam

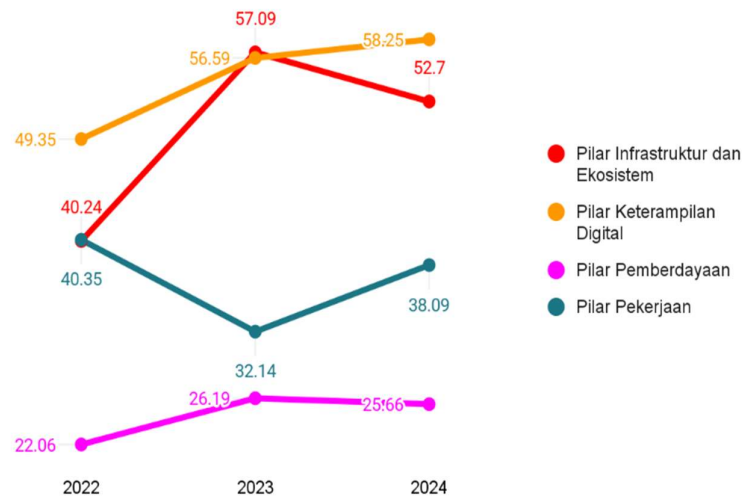
proses pengambilan keputusan strategis guna mendukung pencapaian Visi Indonesia Digital.

Indikator pemanfaatan IMDI oleh Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan jumlah provinsi yang telah menggunakan data IMDI sebagai salah satu sumber rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja terkait pengembangan kompetensi digital masyarakat. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah provinsi yang memanfaatkan IMDI dengan total keseluruhan provinsi di Indonesia. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mengukur tingkat utilisasi data, tetapi juga menggambarkan sejauh mana IMDI telah menjadi bagian dari ekosistem perencanaan berbasis data (*evidence-based policy making*) di tingkat regional.

Melalui pendekatan ini, diharapkan IMDI dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat agenda transformasi digital nasional yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.



Gambar 1.10 Nilai IMDI tahun 2022 - 2024



Gambar 1.11 Nilai IMDI per pilar tahun 2022 - 2024

- **Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi), Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNi) dan Peta Okupasi Nasional bidang Kominfo**

SKKNI merupakan dokumen perumusan kompetensi yang memuat kemampuan kerja seseorang, mencakup tiga dimensi utama yaitu pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang sesuai dan relevan dengan pelaksanaan tugas jabatan maupun persyaratan dalam dunia kerja. SKKNI disusun sebagai pedoman baku yang bertujuan untuk menjamin mutu sumber daya manusia Indonesia agar dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selama 2020--2024, telah ditetapkan sebanyak 18 RSKKNI sektor kominfo menjadi SKKNI oleh Kementerian Ketenagakerjaan, ditambah dengan 2 Rancangan SKKNI (RSKKNi) yang telah diajukan untuk ditetapkan sebagai SKKNI oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pada periode 2020--2024, BPSDM Kominfo memiliki 47 (empat puluh tujuh) SKKNI yang berstatus Berlaku dan 21 (dua puluh satu) SKKNI yang berstatus Dicabut dan Tidak Berlaku, di mana 9 (sembilan) SKKNI di antaranya dicabut pada periode 2020--2024.



Gambar 1.12 Jumlah SKKNI 2020-2024

Selain RSKKNI, BPSDM Kominfo juga menyusun Rancangan KKNi (RKKNi). KKNi merupakan kerangka yang mengatur tingkatan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia dengan menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang telah disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Dengan kata lain, KKNi bertujuan untuk mengakui kemampuan kerja yang sesuai dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Selama 2020-2024 telah disusun sebanyak 3 RKKNi.

Peta Okupasi merupakan *roadmap* yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai pekerjaan atau jabatan dalam suatu sektor industri. Saat ini terdapat 3 (tiga) Peta Okupasi yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Komunikasi, dan Telekomunikasi. Selama 2020–2024 telah melakukan pemutakhiran terhadap Peta Okupasi:

1. Peta Okupasi bidang TIK

Melakukan penyederhanaan area fungsi dari 16 menjadi 6 area fungsi dan perubahan jumlah pekerjaan/okupasi.

2. Peta Okupasi bidang komunikasi

Melakukan perubahan judul area fungsi dan jumlah okupasi.

- **Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di BPSPDM Komdigi**

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi dan telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi tersebut diberikan setelah melalui proses akreditasi oleh BNSP, yang menyatakan bahwa LSP tersebut memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. BPSPDM Kominfo memiliki 2 (dua) LSP yaitu:

1. LSP STMM

Sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu, LSP STMM memiliki mandat untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi terhadap peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Di samping itu, LSP STMM juga menyelenggarakan sertifikasi bagi sumber daya manusia yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam jaringan penyelenggaraan pendidikan yang dikoordinasikan oleh Sekolah Tinggi Multi Media. Peran ini memperkuat komitmen STMM dalam memastikan lulusan dan tenaga kerja di bidang multimedia memiliki kompetensi yang terstandar dan sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan skema sertifikasi:



Gambar 1.13 Skema sertifikasi di LSP STMM

2. LSP BPPTIK

LSP BPPTIK merupakan LSP pihak kedua yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan skema sertifikasi:



Gambar 1.14 Skema sertifikasi di LSP BPPTIK

Kedua LSP tersebut secara berkelanjutan terus diupayakan peningkatan kualitas pengelolaannya. Upaya tersebut meliputi, antara lain:

1. Perpanjangan Lisensi LSP (re-lisensi);
2. Penambahan Ruang Lingkup Skema Sertifikasi;
3. Penambahan jumlah Asesor Kompetensi baru; serta
4. Peningkatan kompetensi Asesor untuk skema sertifikasi yang berbeda (Upgrading Kompetensi).

Selain upaya peningkatan internal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika (BPSDM Kominfo) melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik (Puslitbang Aptika dan IKP) juga menjalankan fungsi fasilitasi eksternal berupa pemberian rekomendasi terhadap pendirian dan/atau perpanjangan lisensi LSP di bidang Komunikasi dan Informatika yang berada di luar lingkup BPSDM Kominfo. Proses pemberian rekomendasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Kepala BPSDM Kominfo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Pendirian dan Perpanjangan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.

- Platform SDM Digital

Platform SDM Digital merupakan inisiatif BPSDM Komdigi yang diharapkan menjadi program prioritas strategis nasional yang berfungsi sebagai infrastruktur inti (*core enabler*) dalam pengembangan, pemetaan, pengelolaan, dan penguatan kapasitas talenta sumber daya manusia pemerintah. Platform ini menjadi fondasi digital dalam membangun model manajemen talenta nasional yang transparan, berbasis kompetensi, adaptif, berorientasi kinerja, dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan modern.

Pengembangan Platform SDM Digital mendukung penuh arah kebijakan transformasi birokrasi, SPBE Nasional, GovTech Indonesia, dan agenda digital nasional dalam memperkuat layanan publik berbasis data. Platform ini menghadirkan integrasi data kompetensi, rekam pelatihan, sertifikasi nasional maupun global, pemetaan kebutuhan jabatan, serta kecerdasan buatan untuk AI Talent Intelligence dan perencanaan kebutuhan talenta masa depan (*workforce forecasting*).

Sebagai platform publik nasional, Platform SDM Digital ditargetkan memenuhi standar global tata kelola teknologi, keamanan informasi, dan privasi data melalui sertifikasi dan implementasi standar internasional, termasuk:

- ISO/IEC 27001: Information Security Management System
- ISO/IEC 27701: Privacy Information Management System
- ISO/IEC 20000: IT Service Management
- ISO/IEC 42000: Artificial Intelligence Management System
- Penerapan Zero Trust Security Architecture dan *privacy-by-design*

Dengan demikian, platform ini berfungsi tidak hanya sebagai sistem pembelajaran digital, tetapi juga sebagai platform publik berskala nasional yang memenuhi standar global, mampu bersaing dan terintegrasi dengan ekosistem layanan digital modern.



Gambar 1.15 Proses Transformasi Ekosistem Pengembangan SDM Digital

Pilar Ekosistem Platform SDM Digital

Pilar	Fokus	Contoh implementasi
<i>Talent Hub</i>	Basis data kompetensi terpadu	Integrasi dengan MyASN (BKN), Skillhub & KarirHub (Kemnaker), Integrasi edutech global
<i>Learning Experience Platform</i>	Pembelajaran personalisasi dan adaptif	<i>Learning path</i> , <i>Microskill</i> , <i>blended learning</i> , integrasi sertifikasi
<i>Talent Intelligence & Analytics</i>	Pemetaan talenta berbasis data	<i>Career path</i> , <i>Predictive talent planning</i>
<i>Governance, Privacy & Security</i>	Kepatuhan hukum dan standar keamanan	UU PDP, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000*, ISO 42000, Responsible AI, Zero Trust Architecture

Tabel 1.1 Pilar Ekosistem Platform SDM Digital

Program	Kegiatan	Output
Program Pengembangan Platform SDM Digital Nasional	Pengembangan arsitektur platform	Enterprise Architecture
	Integrasi data kompetensi lintas sektor	<i>Interoperable Talent Data Layer</i>

	Pengembangan modul pelatihan prioritas	National Learning Catalog
	Implementasi rekomendasi AI	AI Engine
	Sosialisasi dan onboarding lintas sektor	Adopsi lintas sektor
	Monitoring, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan	Sertifikasi ISO, model kematangan dan tata kelola
	Implementasi Helpdesk berbasis AI	AI Chatbot

Tabel 1.2 Program Utama dan Rincian Kegiatan

1.2 Potensi dan Permasalahan

Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan SDM digital di tengah momentum bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada periode 2020-2035. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat ekonomi digital dan memajukan pembangunan nasional. Upaya ini didukung oleh peningkatan akses internet yang semakin meluas dan bertambahnya lulusan perguruan tinggi di bidang digital, yang menjadi modal berharga dalam menghadapi tuntutan era digital. Meski demikian, beberapa tantangan masih dihadapi oleh Indonesia ke depannya, terutama dalam hal keterbatasan infrastruktur, kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri, serta kompleksitas dalam pelaksanaan program pelatihan yang efektif. Peran regulasi dalam sertifikasi digital juga krusial, terutama bagi ASN, guna memastikan mereka memiliki keterampilan yang relevan untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital.

1.2.1 Potensi

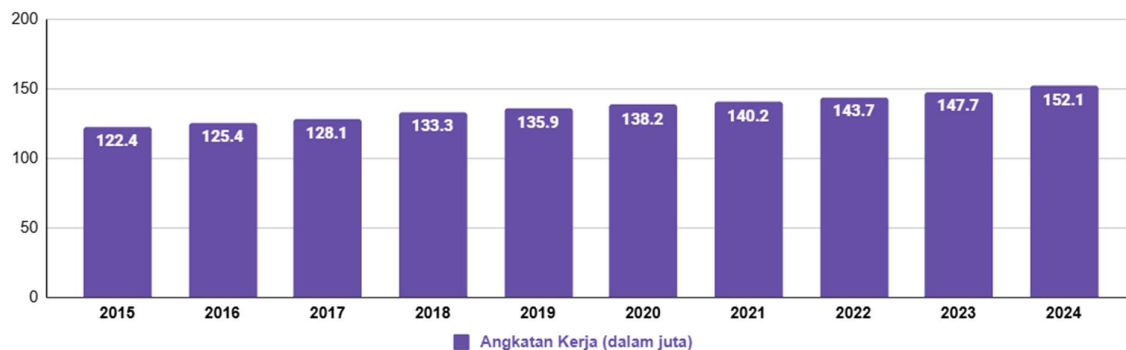
Pengembangan SDM digital di Indonesia didukung oleh faktor pendukung utama. Bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada periode 2020-2035 memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk mengoptimalkan jumlah angkatan kerja yang produktif. Selain itu, pemerintah terus memperluas akses internet, meningkatkan kecepatan, dan memperluas jangkauan, yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan digital. Di sisi lain, peningkatan jumlah lulusan di bidang digital dari perguruan tinggi menambah suplai tenaga kerja yang siap menghadapi tuntutan era digital. Keberadaan basis data yang kuat seperti IMDI sebagai indikator pengukuran awal kebutuhan SDM digital juga menjadi potensi penting dalam pengembangan SDM digital.

Bonus demografi. Potensi SDM digital nasional sebagian akan bergantung kepada struktur kependudukan Indonesia selama lima tahun ke depan dan implikasinya terhadap struktur ketenagakerjaan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2023) Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan puncak bonus demografi akan dicapai pada periode 2020-2030. Bonus demografi tersebut merepresentasikan periode dimana persentase penduduk non usia produktif terhadap populasi nasional mencapai tingkat terendah yang berakibat pada

menurunnya rasio ketergantungan/*dependency ratio*. Jumlah penduduk produktif yang besar menjadi modal bagi Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional selama lima tahun periode RPJMN 2025-2029 termasuk sasaran pembangunan ekonomi digital nasional.

Pada aspek usia produktif, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia melimpah hingga 216.785.997 jiwa pada tahun 2025 (BPS, 2025). Usia produktif terdiri dari penduduk berusia 15-64 tahun yang memiliki potensi untuk berkontribusi pada perekonomian dan pembangunan negara

Pada aspek ketenagakerjaan, pergeseran struktur ketenagakerjaan akan dipengaruhi oleh pergeseran kelompok usia dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK tertinggi berada pada kelompok usia di atas 40 tahun hingga usia 50 tahun. Pada 2024, jumlah angkatan kerja sendiri mencapai 152,1 juta dan diproyeksikan akan terus tumbuh hingga tahun 2045 mencapai 187,4 juta orang atau tumbuh sebesar 1,08% per tahunnya (Kementerian Ketenagakerjaan, 2023). Angka pertumbuhan ini menunjukkan penurunan dibandingkan sepuluh tahun terakhir yang tumbuh sekitar 2% (Gambar 1.16). Meskipun demikian, potensi angkatan kerja tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal. Upaya untuk menyediakan pendidikan dan pengembangan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri menjadi semakin relevan, khususnya pada sektor ekonomi digital.



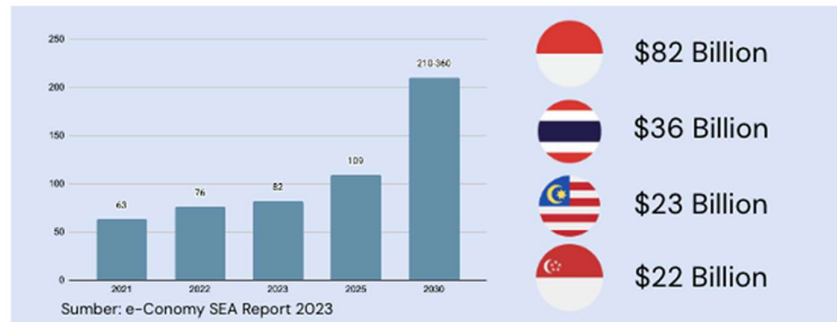
Gambar 1.16 Angkatan Kerja Indonesia, 2015-2024

Sumber: BPS, 2024

Pertumbuhan angkatan kerja dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika diimbangi dengan ketersediaan angkatan kerja yang berkualitas dan berdaya saing. BPSPDM Komdigi dapat berperan meningkatkan keterampilan pekerja nasional, khususnya

dalam menjembatani akses digital dan pendidikan yang tidak merata. Potensi pengembangan keterampilan dapat berfokus kepada kelompok masyarakat yang masih tertinggal sehingga mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif.

Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia memiliki potensi yang cukup besar yang dapat dilihat dari peningkatan nilai ekonomi digital tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Google Temasek 2023, Gross Merchandise Value (GMV) Indonesia meningkat menjadi US\$82 miliar dari tahun 2019 sebesar US\$41 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah tumbuh dua kali lipat pada periode 2019 - 2023. Lebih lanjut, di tengah ketidakpastian ekonomi global, transaksi digital di Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar \$110 miliar pada 2025.



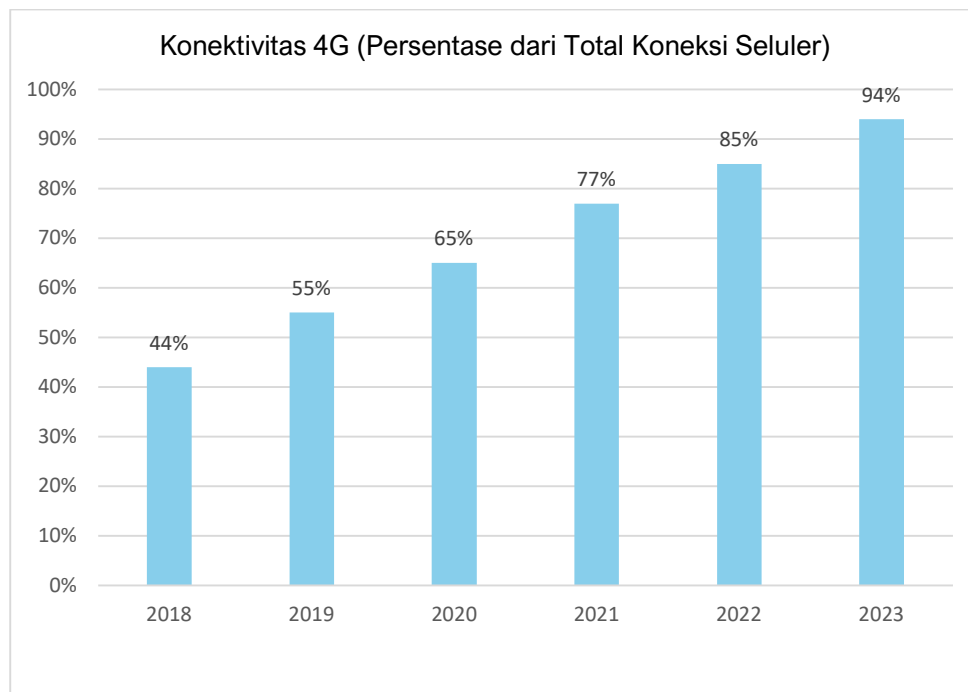
Sumber: e-Conomy SEA Report 2023

Gambar 1.17 Nilai Ekonomi Digital 2023 (Gross Merchandise Value)

Jika dilihat lebih jauh, nilai GMV Indonesia tersebut jauh melampaui negara ASEAN lainnya, seperti Thailand (\$36 miliar), Malaysia (\$23 miliar), dan Singapura (\$22 miliar). Ini mencerminkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi digital ASEAN, dengan potensi pasar digital yang lebih besar. Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat untuk local player Indonesia mengingat dominasi pemain asing yang cukup besar terutama di sektor-sektor strategis seperti e-commerce, media serta iklan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Inisiasi Hilirisasi Digital Nasional 2023, pangsa pasar asing akan menguasai 74% di tahun 2030 dengan potential loss mencapai 2000 Triliun Rupiah jika tidak diantisipasi dan mendapatkan intervensi yang tepat dari pemerintah.

Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Akses Internet di Indonesia. Salah satu aspek yang dapat mendukung upaya BPSDM Komdigi dalam meningkatkan

keterampilan SDM nasional adalah prioritas pemerintah untuk melakukan percepatan perluasan coverage internet. Dalam konteks teknologi layanan internet, capaian pemanfaatan layanan 4G di Indonesia telah mencapai 94 persen, 2G sebesar 5 persen, dan 5G hanya 1 persen di tahun 2023 (GSMA, 2024). Sementara itu, sebagian besar layanan masih didominasi oleh *mobile broadband* dibandingkan *fixed broadband* yang baru mencapai 61,02% kecamatan per Desember 2022 (Komdigi, 2024). Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan biaya pembangunan infrastruktur yang mahal menjadi hambatan perluasan *coverage*. Terlepas dari tantangan pembangunan jaringan dan implementasi program, konektivitas internet Indonesia (4G) mengalami pertumbuhan yang relatif signifikan dan tumbuh lebih dari 100% dibandingkan tahun 2018.

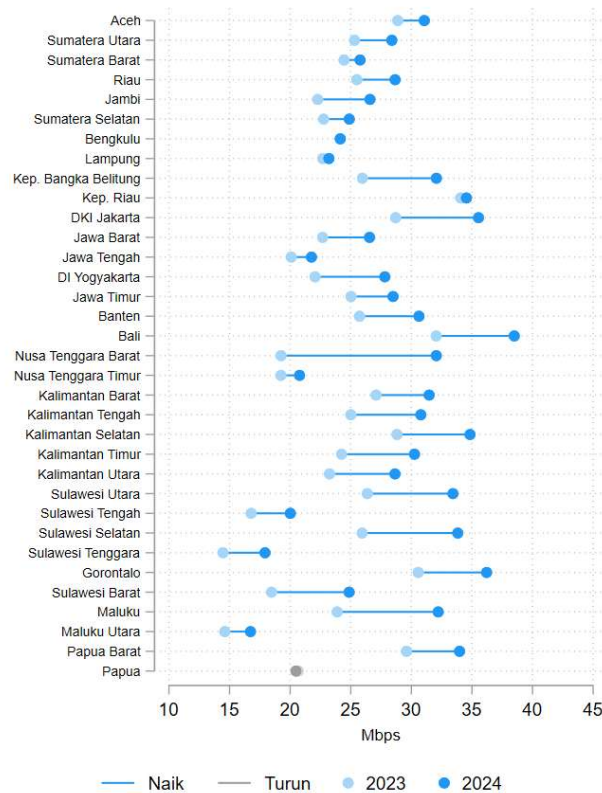


Gambar 1.18 Perkembangan coverage internet 4G di Indonesia

Sumber: The Mobile Economy Asia Pacific Report, GSMA

Kemkomdigi melalui berbagai program seperti BAKTI (pembangunan BTS), Satelit Satria, dan Palapa Ring (kabel fiber optik) berupaya memperluas coverage dan meningkatkan kualitas infrastruktur konektivitas internet dan daya saing layanan. Upaya perluasan jangkauan dan percepatan jaringan internet juga akan didukung oleh rencana pemerintah pelelangan spektrum frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, dan 26 GHz.

Pelelangan spektrum diharapkan dapat memacu peningkatan perluasan *coverage* oleh operator telekomunikasi.



Catatan: Data 2024 (Januari-Juni) dan 2023 (Desember)

Gambar 1.19 Rata-rata Kecepatan Unduh Berdasarkan Provinsi

Sumber: Ookla

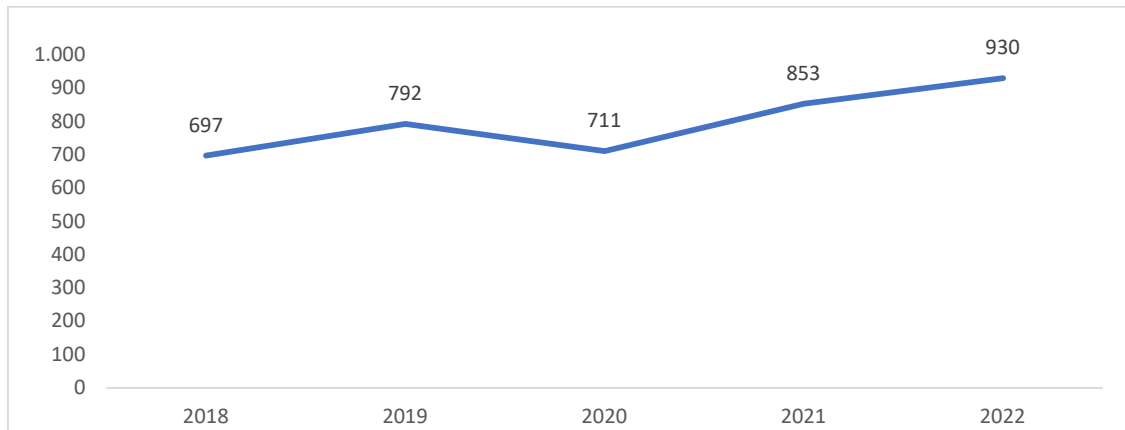
Selain dari sisi *coverage*, perbaikan akses internet di Indonesia juga terlihat dari peningkatan rata-rata kecepatan unduhan di hampir seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, sebagaimana ditunjukkan oleh grafik di atas. Bahkan provinsi, yang berada jauh dari pusat pertumbuhan seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Maluku mengalami peningkatan signifikan dalam kecepatan unduh. Meskipun demikian, masih terdapat pola dimana peningkatan kecepatan unduhan masih lebih dominan di wilayah dengan infrastruktur digital yang lebih berkembang seperti Jawa dan Kalimantan. Data ini mengindikasikan bahwa dari waktu ke waktu sudah terlihat adanya perbaikan dalam hal disparitas kualitas akses

internet di berbagai daerah, walaupun masih ada disparitas antar provinsi yang masih perlu terus diperbaiki di masa depan.

Peningkatan akses internet dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pengembangan keterampilan SDM digital oleh BPSDM Komdigi. Perluasan akses internet yang inklusif diharapkan membuka kesempatan pengembangan keterampilan dan pendidikan bagi SDM digital, khususnya bagi penduduk usia muda dan mengurangi ketimpangan akses antara wilayah Timur dan Barat Indonesia. Peran BPSDM Komdigi sebagai penyusun kebijakan akan semakin penting selain sebagai penyedia layanan pengembangan SDM secara langsung. Hal tersebut dapat dicapai melalui upaya membangun ekosistem pendidikan dan pelatihan digital yang inklusif sebagai komplemen program yang sudah ada.

Pertumbuhan lulusan jurusan digital. Potensi pengembangan ekonomi digital Indonesia salah satunya berasal dari semakin bertambahnya lulusan perguruan tinggi di bidang digital. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek), lulusan perguruan tinggi diploma, sarjana, dan pascasarjana di bidang digital cenderung meningkat dari tahun 2018 hingga 2022.

Perguruan tinggi sebagai wadah pendidikan formal memiliki peran tidak tergantikan dalam menyediakan akses terhadap peningkatan keterampilan digital bagi masyarakat luas. Pendidikan merupakan satu dari tiga kanal pengembangan keterampilan digital selain pelatihan dan bekerja (SMERU, University of Oxford, & UNSECAP, 2022). Berdasarkan European Union (2024) tingkat pendidikan formal berkorelasi positif terhadap tingkat keterampilan digital yang dicapai. Pendidikan formal secara umum membuka akses terhadap keterampilan dasar (i.e., numerik dan literasi) dan meningkatkan literasi digital (SMERU, 2022; OECD, 2016). Termasuk di dalamnya adalah *soft-skills* yang terkait dengan interaksi sosial dan emosional dalam mendukung kolaborasi dan fleksibilitas.



Gambar 1.20 Jumlah Lulusan Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana terkait Digital (ribu orang)

Sumber: Kemendikbud, diolah

Keberadaan IMDI sebagai basis data kebutuhan skill digital Industri. Komdigi melalui BPSDM melakukan pemetaan terhadap pengembangan keterampilan dan kompetensi digital masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). IMDI terdiri dari empat pilar, yaitu pilar infrastruktur dan ekosistem, pilar keterampilan digital, pilar pemberdayaan, dan pilar pekerjaan. IMDI diukur pada 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran yang spesifik terhadap kebutuhan keterampilan digital hingga pada tingkat kab/kota.

Lebih dari itu pengukuran IMDI tidak hanya dilakukan dari sisi *supply* dari SDM digital (masyarakat), tapi juga dari sisi *demand* (perusahaan dan industri). Berkat hal tersebut, hasil dari pengukuran IMDI dapat menjadi basis untuk (i) mengukur tingkat kualitas SDM digital Indonesia, (ii) estimasi perkembangan permintaan kebutuhan SDM digital (iii) hingga evolusi perubahan kebutuhan skill digital yang dibutuhkan oleh industri, yang kesemuanya dapat dilihat secara antar waktu dan antar wilayah.

Pengukuran IMDI melalui masing-masing pilar memberikan potret atas kondisi SDM digital Indonesia dari sisi *supply* dan *demand*. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem menjadi pondasi dari ekosistem sebagai prekondisi untuk mewujudkan kesetaraan akses bagi masyarakat. Pada tahun 2023, skor IMDI mencapai 37,8 secara nasional dengan skor 40,24 untuk infrastruktur dan ekosistem, 49,35 untuk Keterampilan Digital, 22,06 untuk Pemberdayaan, dan 40,35 untuk Pekerjaan. Rendahnya capaian

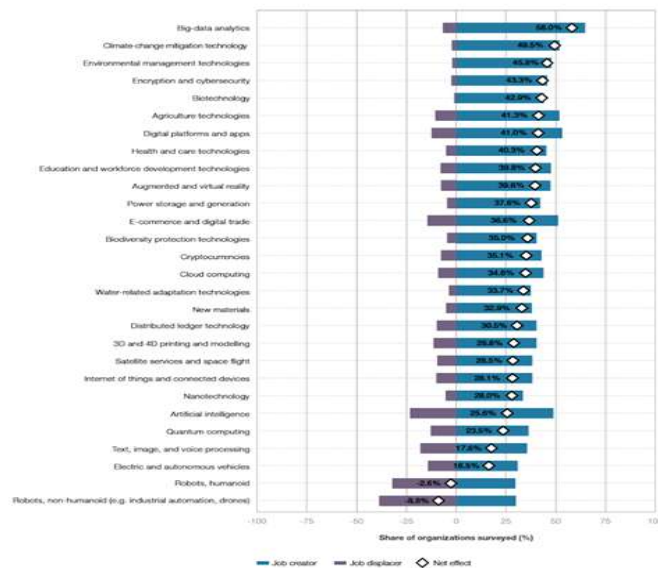
pada Pilar Pemberdayaan menunjukkan bahwa kemampuan digital masyarakat dalam hal pemanfaatan layanan keuangan, *e-commerce*, *market-place*, dan *e-learning* dalam menghasilkan pendapatan masih relatif rendah. Secara nasional, aspek tersebut dapat menjadi fokus utama pelatihan dengan mempertimbangkan juga karakteristik skor IMDI daerah.

Platform Sebagai *game changer* transformasi tata kelola ekosistem talenta

Platform SDM Digital diidentifikasi sebagai respon strategis terhadap kebutuhan peningkatan literasi digital, penguatan kompetensi talenta nasional, integrasi data talenta lintas sektor (pemerintah, industri, pendidikan), serta kebutuhan percepatan transformasi pelayanan publik berbasis data dan AI. Platform ini memberikan kemudahan akses untuk mengatasi fragmentasi data talenta dan kesenjangan kompetensi digital nasional melalui mekanisme interoperabilitas, SSO, analisis talenta, dan ekosistem sertifikasi nasional dan global. Platform SDM Digital merupakan inisiatif BPSDM Komdigi yang diharapkan menjadi program prioritas strategis nasional yang berfungsi sebagai infrastruktur inti (*core enabler*) dalam pengembangan, pemetaan, pengelolaan, dan penguatan kapasitas talenta sumber daya manusia pemerintah. Platform ini menjadi fondasi digital dalam membangun model manajemen talenta nasional yang transparan, berbasis kompetensi, adaptif, berorientasi kinerja, dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan modern. Pengembangan Platform SDM Digital mendukung penuh arah kebijakan transformasi birokrasi, SPBE Nasional, GovTech Indonesia, dan agenda digital nasional dalam memperkuat layanan publik berbasis data. Platform ini menghadirkan integrasi data kompetensi, rekam pelatihan, sertifikasi nasional maupun global, pemetaan kebutuhan jabatan, serta kecerdasan buatan untuk AI Talent Intelligence dan perencanaan kebutuhan talenta masa depan (*workforce forecasting*).

Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi di era digital saat ini telah menjadi pendorong utama transformasi di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam meningkatkan daya saing nasional. Dalam konteks perekonomian, teknologi menjadi salah satu *macrotrend driver* utama yang mendorong transformasi bisnis di berbagai perusahaan selama beberapa tahun ke depan. Hal ini dapat dilihat dalam laporan "*Future of Jobs*" oleh

World Economic Forum (2023), yang menunjukkan bahwa peningkatan adopsi teknologi baru dan terdepan serta perluasan akses digital menjadi dua faktor pendorong utama transformasi bisnis dengan proporsi 86,2% dan 86,1%. Angka ini menggambarkan betapa pentingnya teknologi dalam menggerakkan perubahan di sektor bisnis dan ekonomi global. Apabila kemajuan teknologi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi salah satu negara maju di dunia. Penguasaan teknologi dan pengembangan sektor digital diyakini dapat memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang, terutama dalam hal meningkatkan produktivitas nasional. Peningkatan produktivitas ini akan terjadi melalui efisiensi penggunaan kapital dan tenaga kerja, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai penelitian (Oliner & Sichel, 2003; OECD, 2013; Qiang, Pitt & Ayers, 2004). Di sisi lain, teknologi juga berperan sebagai penggerak inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing di kancah global. Selain itu dengan membekali para tenaga kerja Indonesia dengan skill-skill yang relevan, maka perkembangan teknologi justru akan menghadirkan peluang besar dalam bentuk lapangan pekerjaan baru dan peningkatan produktivitas. World Economic Forum (2023) melalui publikasinya *the Future of Jobs Report* memprediksi beberapa skill khusus yang akan meningkat permintaannya di masa depan seperti *big data analyst*, spesialis mitigasi perubahan iklim, dan ahli keamanan siber sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1.21 Perkiraan Dampak Perkembangan Teknologi terhadap Lapangan Pekerjaan periode 2023 - 2027

Sumber: WEF (2023)

Oleh karena itulah, keberadaan pekerjaan-pekerjaan baru ini menegaskan pentingnya penyiapan SDM dan talenta digital yang terencana dan terarah, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi.

1.2.2 Permasalahan

Selain adanya potensi dan peluang, upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM digital di Indonesia juga menemui beberapa tantangan ini berasal dari keterbatasan dan ketimpangan akses, ketidaksesuaian antara pelatihan dengan kebutuhan industri, serta berbagai kendala dalam implementasi program pelatihan.

***Digital mindset* masyarakat yang masih tergolong rendah.** *Digital mindset* merupakan pola pikir yang mendorong individu dan organisasi untuk mengadopsi, memahami, serta beradaptasi dengan teknologi digital. Benke (2013) mendefinisikan digital mindset ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi kognitif dan dimensi aksi. Pada dimensi kognitif, *digital mindset* berkaitan dengan kemampuan memahami teknologi digital dan peluang yang ditawarkannya. Sementara itu, dimensi aksi berfokus pada bagaimana individu atau organisasi tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga dapat menerapkannya secara nyata dalam aktivitas sehari-hari maupun bisnis. Oleh karenanya, memiliki *digital mindset* sangat penting di tengah-tengah kemajuan teknologi yang kian pesat.

Akan tetapi, *digital mindset* pada masyarakat Indonesia dapat dikatakan masih tergolong rendah. Hal ini yang turut menyebabkan banyak individu dan organisasi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang semakin dinamis. Sebagai contoh indikator yang setidaknya dapat digunakan untuk mengetahui *digital mindset* adalah melalui literasi dan keterampilan digital. Tingkat literasi dan keterampilan digital menjadi parameter yang cukup penting dalam menentukan seberapa baik individu atau organisasi memahami serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan Indeks Literasi Digital, pada tahun 2023, Indonesia memiliki skor 3,65 dari skala 5 (Indeks Literasi Digital, Komdigi, 2023). Hal ini menunjukkan tingkat literasi digital yang dimiliki oleh berbagai segmentasi masyarakat masih rendah. Gambar di bawah menunjukkan salah satu indikator yang memperlihatkan bahwa peringkat keterampilan digital Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia



Gambar 1.22 Peringkat Keterampilan Digital Indonesia dibandingkan tetangga

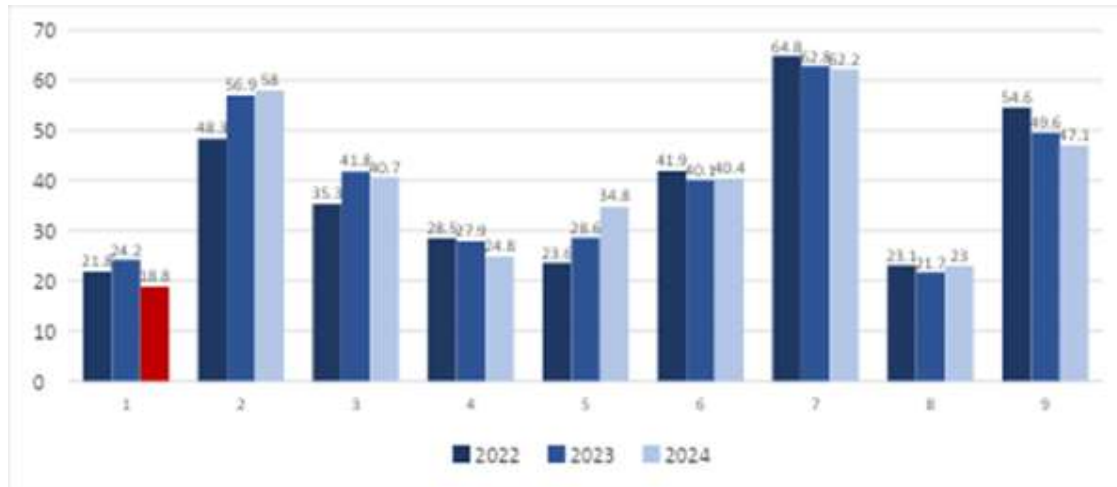
Sumber: The Global Competitiveness Index (GCI), World Economic Forum

Literasi dan keterampilan digital yang rendah berdampak pada sosial kemasyarakatan. Pertama, hal ini berpengaruh pada peningkatan kejahatan etika di dunia maya. Terdapat 3.840 ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital (Komdigi, 2023). Kemudian, sebanyak 12.647 konten hoaks selama 5 tahun terakhir (Databoks, 2024). Kedua, terkait peningkatan konten negatif. Di mana, penyebaran konten pornografi terus meningkat mencapai 1,21 juta konten pada tahun 2023 (Komdigi, 2023). Terakhir, masifnya penipuan finansial yang ditunjukkan dari peningkatan pinjaman online hingga Rp 51,46 triliun (OJK, 2023) serta transaksi judi online warga Indonesia menembus rekor tertinggi dengan meningkat sebesar 8.136,77% dari 2018-2023 (Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023).

Keterbatasan pemahaman dan penerapan teknologi digital juga akan membuat masyarakat kita cenderung tertinggal dalam mengadopsi inovasi baru. Selain itu, rendahnya *digital mindset* ini juga akan berdampak pada kemampuan individu maupun bisnis, terutama UMKM, dalam bersaing di era digital. Sebagai contoh, tanpa pemahaman yang kuat terhadap teknologi dan kurangnya usaha dalam mengadopsi digitalisasi, membuat tidak sedikit usaha yang terjebak dalam model bisnis lama, sehingga kurang mampu menangkap peluang seperti memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Sementara itu, UMKM yang setidaknya memiliki *digital mindset* di level kognitif dan aksi akan lebih siap untuk memanfaatkan teknologi digital dalam bisnisnya. Sebagai contoh, mendaftarkan usaha di platform *e-commerce* untuk memperluas pasar.

Rendahnya Kualitas dan Ketersediaan Pekerja dengan Skill Digital. Proses penyiapan talenta digital di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kualitas dan ketersediaan SDM yang memiliki keterampilan digital yang memadai. Hal ini tercermin dari penurunan skor pilar sumber daya manusia dalam *East Venture Digital*

Competitiveness Index (EV-DCI), di mana skor pilar *human resource* menurun *drastic* dari 24.2 pada 2022 menjadi 18.8 pada 2023, menjadikannya pilar dengan capaian terendah (Gambar 1.4). Penurunan ini menunjukkan masih minimnya talenta digital yang berkualitas sebagai input dari proses transformasi digital.

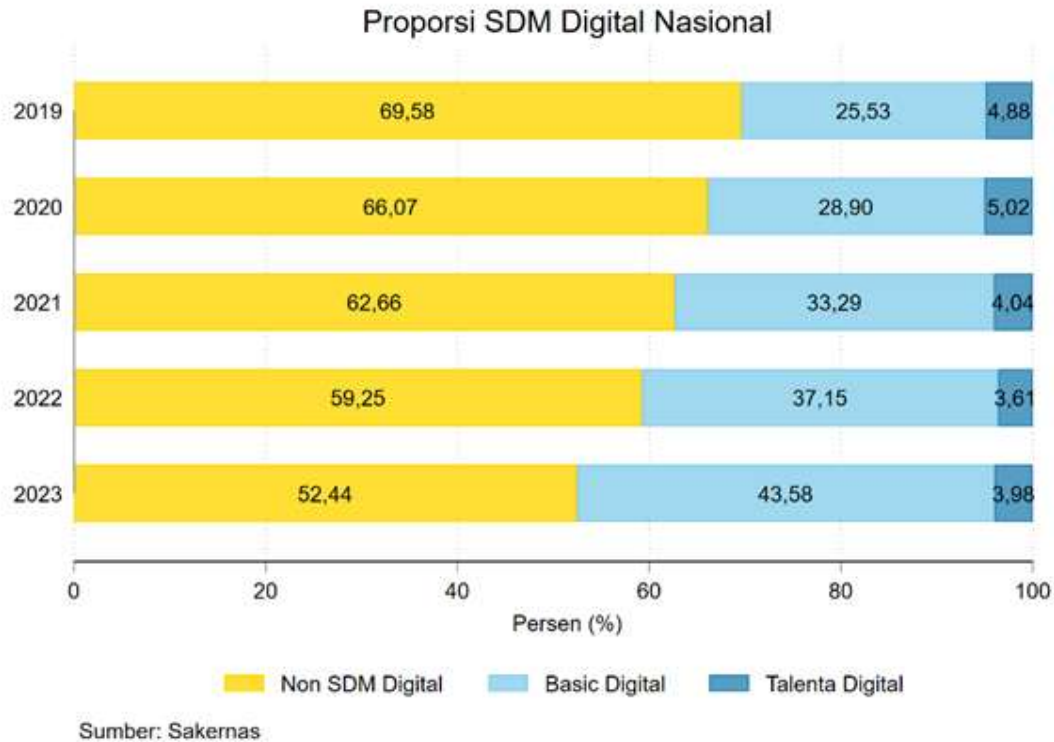


Gambar 1.23 Perkembangan Skor EV-DCI Indonesia

Sumber: East Venture, (2023)

Kemudian, SDM Indonesia juga dapat dikategorikan rendah dan jauh jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 2023, *talent competitiveness* Indonesia menduduki peringkat ke-80 dari 134 negara dengan skor 40,25. Sementara itu, negara tetangga seperti Singapura yang berhasil menempatkan negaranya di peringkat ke-2 dengan skor yang jauh lebih tinggi 77,11 dan Malaysia yang berada di peringkat ke-42 dengan skor 51,35.

Berdasarkan pemetaan data SAKERNAS selama tiga tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan proporsi SDM digital nasional dari tahun ke tahun. Akan tetapi, tren peningkatan ini didorong oleh peningkatan SDM digital pada level *basic* yang pada tahun 2023 sudah tercatat sebesar 43.6% dari yang hanya 33.3% di tahun 2021. Akan tetapi untuk talenta digital nampak tidak ada pertumbuhan yang signifikan, bahkan pada tahun 2022 angkanya sempat mengalami penurunan, sebelum akhirnya naik lagi di tahun 2023 yaitu di kisaran 4%. Secara absolut, jumlah SDM digital pada level *basic* berjumlah sekitar 64,37 juta, sedangkan untuk talenta digital sebanyak 5,88 juta dari total angkatan kerja di tahun 2023.



Gambar 1.24 Kondisi Eksisting Ketersediaan Talenta Digital Indonesia

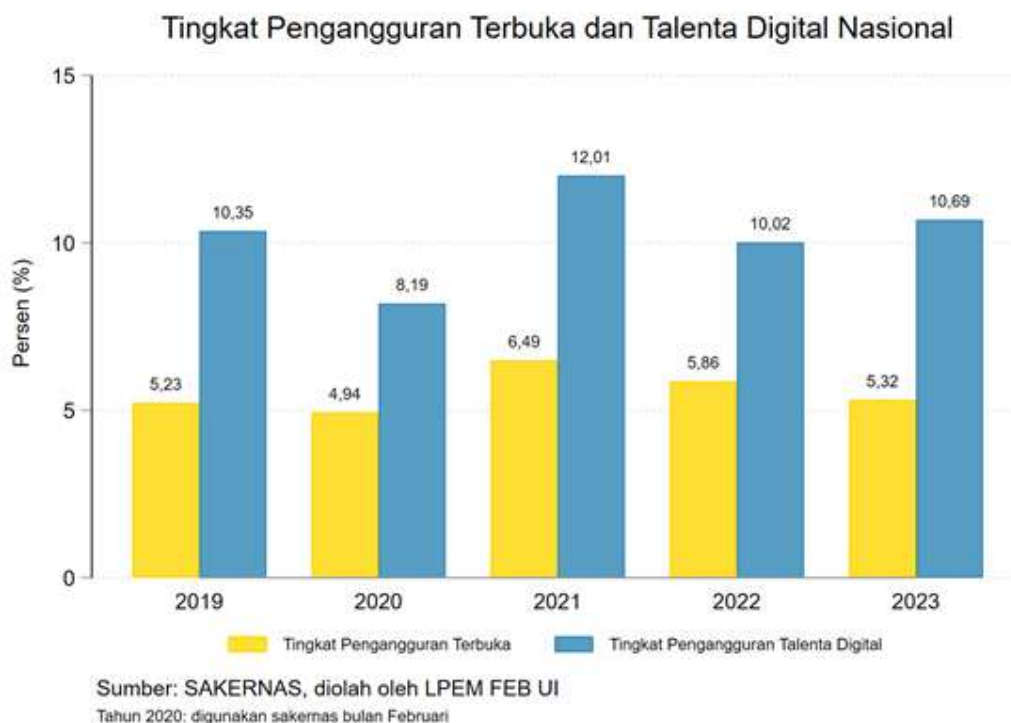
Sumber: BPSDM Komdigi & LPEM FEB UI, (2024)

Untuk melihat secara lebih dalam permasalahan terkait sumber daya manusia dalam konteks digital, dapat dilakukan dengan melihat capaian skor Indeks Masyarakat Digital (IMDI) yang diukur oleh Puslitbang APTIKA dan IKP (sekarang Pusbang Ekosistem SDM Komdigi) di bawah BPSDM Komdigi. Berdasarkan capaian skor IMDI, pilar yang memiliki capaian terendah adalah pilar pekerjaan dan pemberdayaan terutama untuk sisi *supply* tenaga kerja baik dalam konteks pegawai (pilar pekerjaan), maupun pelaku usaha (pilar pemberdayaan). Hal ini memberikan indikasi bahwa *skill* digital yang dimiliki oleh penduduk Indonesia masih relatif minim dalam konteks aktivitas produktif.

Mismatch Skill Digital dengan Kebutuhan Industri. Lebih jauh, skor yang sangat rendah untuk sub pilar penawaran mengindikasikan belum mampunya *supply* dari talenta digital di Indonesia untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan oleh industri. Sebanyak 56,3% responden survei (perusahaan) mengatakan sulit atau sangat sulit untuk mencari pekerja dengan kemampuan digital (Kemenaker, 2023). Ketersediaan talenta digital untuk tahun 2024 adalah 6.507.904 orang, sementara kebutuhan talenta

digital tahun 2024 mencapai 10.731.209 orang. Salah satu penyebab dari hal ini adalah *mismatch* keterampilan digital antara yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran talenta digital di Indonesia secara konsisten berada di atas 10%, jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional yang hanya sekitar 5% (Gambar 1.7).

Hal ini mengindikasikan adanya *gap* signifikan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri, yang menyebabkan banyak lulusan dengan keterampilan digital tidak dapat terserap dengan baik di pasar kerja. Sementara itu, rasio tenaga kerja *sector* TIK terhadap tenaga kerja keseluruhan di Indonesia hanya 0,8%. Angka ini lebih rendah dibandingkan negara lainnya seperti Malaysia (7,7%), China (3%), dan India (1%).



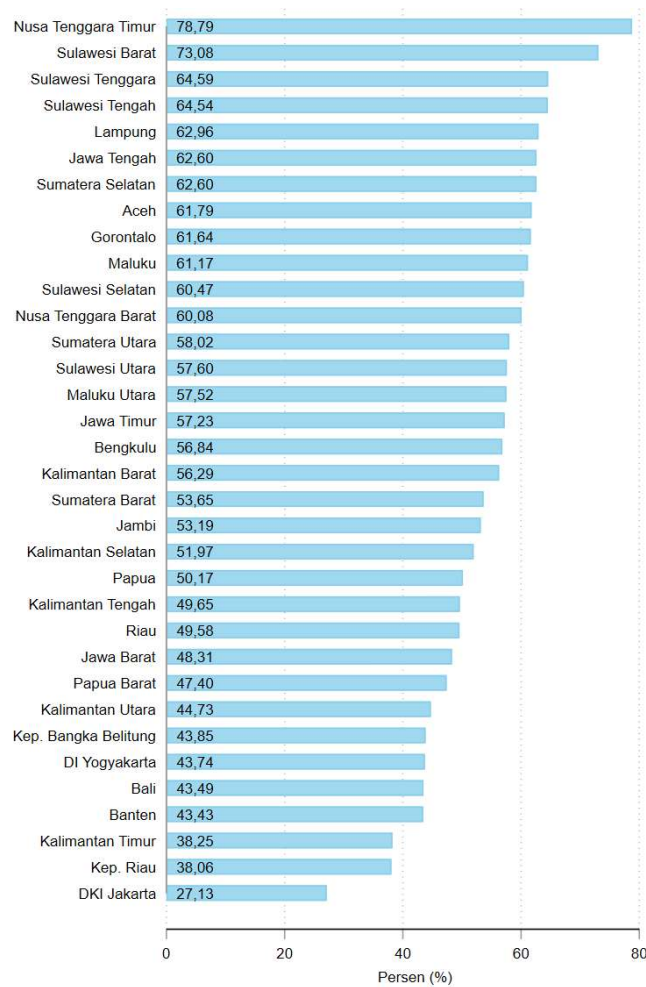
Gambar 1.25 Tingkat Pengangguran Talenta Digital Indonesia

Sumber: Sakernas, diolah oleh LPEM FEB UI (2023), Sakernas tahun 2020 yang digunakan adalah SAKERNAS pada Bulan Februari

Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Pelatihan. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan SDM digital adalah keterbatasan infrastruktur dan akses pelatihan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Masalah ini menjadi sangat signifikan di daerah terpencil dan tertinggal di mana akses terhadap teknologi digital, termasuk jaringan internet dan perangkat komputer, masih sangat terbatas. Ketimpangan ini menyebabkan banyak SDM di wilayah tersebut belum memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan teknologi digital, yang pada gilirannya menghambat partisipasi mereka dalam ekonomi digital yang berkembang pesat. Di sisi lain, wilayah-wilayah ini sering kali memiliki akses terbatas yang sulit dijangkau, yang membuat pelaksanaan pelatihan menjadi sulit dijangkau. Kurangnya perencanaan biaya teknis seperti biaya transportasi juga menjadi kendala, menyebabkan pelatihan tidak dapat mencapai seluruh peserta yang membutuhkan.

Selain itu, akses terhadap pelatihan digital yang berkualitas masih terbatas, tidak hanya dari segi geografis tetapi juga biaya. Beberapa modul pelatihan gratis dapat diunduh oleh masyarakat, tetapi memiliki hambatan dari sisi kualitas internet kesulitan untuk mengakses materi pelatihan yang disediakan. Sementara itu untuk pelatihan berbayar, tercatat bahwa biaya pelatihan dan sertifikasi digital yang masih tinggi menjadi penghalang bagi banyak individu yang ingin meningkatkan keterampilan mereka. Sementara itu, dukungan pembiayaan seperti beasiswa atau subsidi untuk pelatihan digital masih sangat minim.

Situasi ini mengakibatkan disparitas yang semakin besar antara mereka yang mampu mengikuti pelatihan dan yang tidak, memperburuk ketimpangan dalam keterampilan digital di Indonesia.



Gambar 1.26 Proposal Biaya Pelatihan terhadap Rata-rata Pengeluaran per Kapita

Sumber: Susenas 2023, Google

Catatan: Biaya pelatihan yang digunakan diambil dari biaya pelatihan per kursus (\$49/bulan dari Google Career Certificates di Platform Coursera)

Gambar 1.26 menggambarkan proporsi rata-rata biaya pelatihan bersertifikasi dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita di setiap provinsi. Sebagai ilustrasi, biaya rata-rata pelatihan bersertifikasi Google Academy di platform Coursera per bulan mencapai sekitar \$49 atau Rp757.341. Angka ini menunjukkan bahwa biaya tersebut merupakan beban yang signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Sebagai contoh, penduduk DKI Jakarta perlu mengalokasikan sekitar 27% dari pengeluaran per kapitanya untuk mengikuti pelatihan ini. Sementara itu, di provinsi yang relatif tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur, biaya tersebut dapat mencapai hingga 78% dari pengeluaran per kapita.

Perlu diperhatikan bahwa biaya yang disebutkan adalah untuk satu bulan, sedangkan peserta baru dapat memperoleh sertifikasi jika menyelesaikan kursus dalam waktu sekitar 6 bulan, sehingga total biaya dapat mencapai \$300. Selain itu, biaya pelatihan lain mungkin berbeda, tergantung pada jenis dan bidang sertifikasi yang diikuti.

Ketidaksesuaian Pendidikan dan Pelatihan dengan Kebutuhan Industri.

Ketidaksesuaian antara pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan industri merupakan tantangan terutama dalam kerangka keterampilan digital. Dengan keterampilan digital yang berkembang dengan cepat dan penyesuaian di industri yang cepat beradaptasi, tema pelatihan yang ditentukan oleh penyedia pelatihan terutama di level pusat seringkali tidak relevan dengan kebutuhan industri di daerah. Hal ini yang menyebabkan potensi *mismatch* antara talenta digital yang dihasilkan dengan kebutuhan industri lokal. Ketidakselarasan ini tidak hanya memperlambat integrasi SDM ke dalam dunia kerja tetapi juga memperburuk ketimpangan antara daerah yang lebih maju secara digital dengan yang tertinggal.

Selain itu, dinamika perubahan teknologi yang cepat menuntut sistem pelatihan yang responsif, tetapi sistem pelatihan di Indonesia masih tertinggal dalam hal ini. Penelitian yang seharusnya dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja digital secara makro masih sangat minim, yang berujung pada peta okupasi yang tidak diperbarui secara tepat waktu. Hal ini mengakibatkan kompetensi tenaga kerja yang tidak sesuai dengan permintaan pasar, sehingga lulusan pelatihan tidak siap untuk berkontribusi secara efektif dalam industri yang terus berubah.

Perkembangan teknologi digital yang pesat, perbedaan kecepatan antara kebutuhan industri dan penyesuaian di institusi pendidikan serta proses birokrasi seperti dalam penyesuaian SKKNI menimbulkan kendala dalam proses penyesuaian antara kebutuhan dengan kurikulum dan standar kompetensi yang diberikan. Kurikulum pendidikan sering membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar, karena proses revisi yang harus melalui beberapa tahap pengesahan dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini menyebabkan keterampilan yang diajarkan kadang kurang sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri digital yang terus berkembang. Di sisi lain, standar kompetensi juga memerlukan proses yang cermat dan tidak selalu dapat mengikuti perubahan teknologi yang cepat. Tantangan lainnya adalah kolaborasi antara institusi pendidikan dan dunia industri

yang masih perlu ditingkatkan, agar kurikulum dan pelatihan yang diberikan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri digital saat ini. Kolaborasi yang lebih erat diharapkan dapat mempercepat proses penyesuaian, sehingga pengembangan SDM digital lebih efisien dan efektif dalam menghadapi dinamika perubahan di dunia kerja digital.

Kendala dalam Implementasi Program Pelatihan. Dalam implementasi program pelatihan, pemerintah menghadapi berbagai tantangan internal yang signifikan. Salah satu isu utama adalah standar penyelenggaraan pelatihan yang belum sama untuk semua wilayah. Selain itu, standar kompetensi pengajar yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah juga menjadi hambatan. Kondisi ini memberikan gambaran perlunya peningkatan relevansi pelatihan dengan peningkatan keterampilan peserta pelatihan.

Kapasitas SDM di Balai Pelatihan juga merupakan tantangan tersendiri karena balai-balai pelatihan memiliki keterbatasan dalam berinovasi, yang berdampak pada kualitas pelatihan yang diselenggarakan. Ketimpangan dalam pembagian wilayah kerja, target peserta, dan sumber daya juga menambah kompleksitas tantangan ini. Wilayah-wilayah dengan ekosistem pelatihan digital yang lebih maju dan infrastruktur yang lebih baik cenderung lebih diuntungkan, sementara daerah-daerah yang kurang berkembang semakin tertinggal.

Tantangan lain dalam implementasi pelatihan adalah optimalisasi pengawasan dan evaluasi (*monitoring and evaluation/ monev*) serta tata kelola pelatihan. Monev yang dilakukan setiap enam bulan tidak cukup untuk memberikan umpan balik yang cepat dan akurat, yang diperlukan untuk peningkatan kualitas pelatihan secara kontinu. Optimalisasi monev akan mempercepat proses perbaikan dan penyesuaian program pelatihan, sehingga secara efektif memenuhi kebutuhan yang berkembang. Selain itu, manajemen dan tata kelola pelatihan dalam pengembangan SDM digital juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian. Manajemen data masih terpisah antar satuan kerja menciptakan fragmentasi informasi, yang menghambat upaya pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk pengembangan SDM juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pelatihan yang diselenggarakan.

Ketersediaan ASN dengan keterampilan digital. Tantangan SDM digital di kalangan pemerintah salah satunya terletak pada bagaimana menentukan standar yang seragam dalam penguasaan keterampilan digital yang dibutuhkan. Di era transformasi digital, ASN diharuskan memiliki kompetensi yang relevan untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Keterampilan ini meliputi kemampuan teknis dalam penggunaan perangkat lunak, data management, sampai dengan keamanan siber yang memadai. Namun, pemetaan kualifikasi ASN digital, terutama di level teknis dan manajerial, masih perlu dioptimalkan dalam rangka mendukung produktivitas dan adopsi teknologi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan penyelerasan yang terpadu terkait sertifikasi keterampilan digital untuk semua jenjang ASN.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kompetensi pegawai pemerintahan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan baik klasikal maupun nonklasikal. Akan tetapi, belum ada payung hukum yang dapat menjadi dasar untuk mendorong pelatihan di bidang digital serta konversinya untuk mendukung peningkatan jabatan pegawai pemerintahan. Hal ini dibutuhkan dalam rangka mendorong dan menginsentif peningkatan ASN digital.

1.3 Analisis SWOT Jangka Menengah

<i>Strengt</i>	<i>Opportunities</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Bonus demografi memberikan potensi pengembangan ekonomi digital yang semakin besar - Penetrasi internet Indonesia cukup tinggi dan terus bertumbuh setiap tahun. - Ekosistem startup dan industri digital berkembang pesat, mendorong kebutuhan dan peluang kerja bagi talenta digital. - Kolaborasi lintas pemangku kepentingan (pemerintah–industri–universitas) mulai terbangun dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi pasar nasional yang besar dapat mendorong peningkatan adopsi teknologi dan layanan digital. - Potensi pasar nasional yang besar dapat mendorong peningkatan adopsi teknologi dan layanan digital. - Berbagai Kementerian/lembaga sedang berprogress dalam bertransformasi digital dalam upaya peningkatan layanan publik. - Peluang kerja sama dengan media swasta dan lokal untuk

<p>pengembangan kurikulum dan upskilling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banyak wilayah baru yang telah terpenetrasi internet, membuka peluang pengembangan ekonomi. 	<p>memperluas jangkauan pelatihan SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya minat generasi muda pada karir digital, termasuk freelance dan entrepreneurship digital.
Weaknesses	Threats
<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas SDM dan literasi digital masih rendah, terutama di pedesaan (kesenjangan tinggi). - Ketidakseimbangan antara kuantitas lulusan IT dengan kualitas dan relevansi kompetensi, terutama skills praktis dan <i>industry-ready</i>. - Kurangnya standar nasional kompetensi digital yang terintegrasi (fragmentasi kurikulum, sertifikasi, dan kerangka kompetensi). - Koordinasi antar instansi pemerintah masih lemah sehingga program sering tumpang tindih - Kesenjangan akses informasi publik akibat jaringan humas pemerintah yang belum terkoordinasi secara optimal, terutama di wilayah 3T. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disrupsi teknologi cepat: kompetensi yang relevan saat ini dapat cepat usang jika tidak ada program continuous learning. - Perubahan regulasi yang lambat dibanding perkembangan teknologi dapat menghambat implementasi strategi SDM digital. - Kekhawatiran keamanan dan privasi data, risiko keamanan siber yang tinggi. - Meningkatnya kompetisi dengan negara-negara regional dalam memanfaatkan potensi digitalisasi. - Kesiapan digital yang kurang. Mindset masyarakat yang belum siap menghadapi perubahan dan perkembangan digital. - Maraknya dampak sosial dari adopsi digital, seperti penipuan, judi online, disinformasi dan misinformasi berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik.

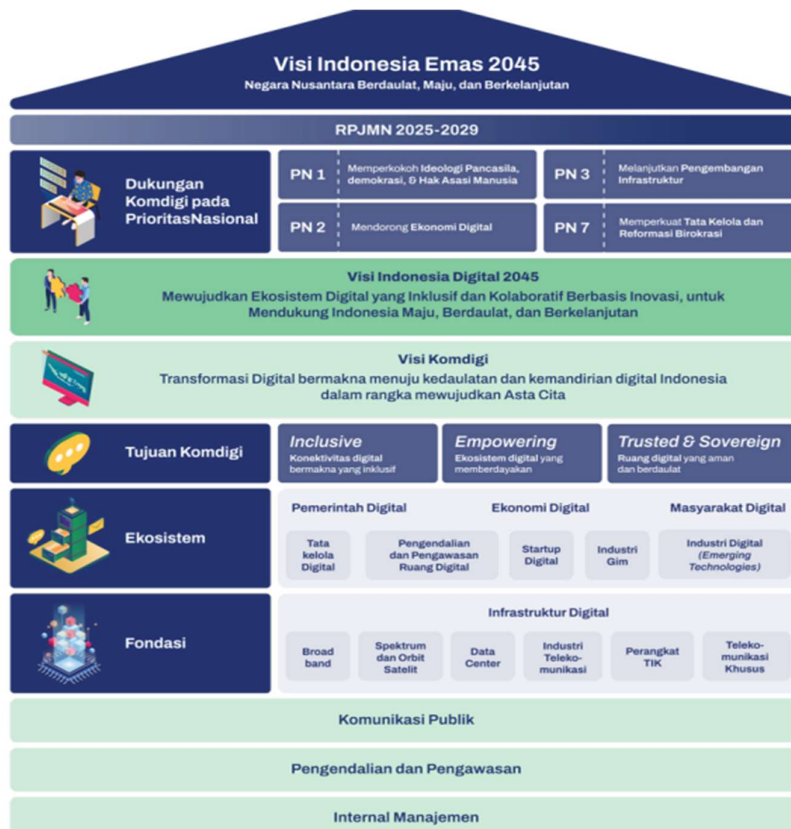
Tabel 1.3 Analisis SWOT

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Kementerian Komunikasi dan Digital

“Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Asta Cita”.



Gambar 2.1 Kerangka Pilar Pembangunan Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

Sumber : Komdigi, 2025

BPSDM Komdigi sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memiliki mandat strategis dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital mendukung visi Kemkomdigi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPSDM Komdigi berperan sebagai penggerak utama pembangunan kompetensi SDM yang

adaptif terhadap perkembangan teknologi, inovasi, dan kebutuhan transformasi digital nasional, serta secara konsisten mendukung pencapaian visi Kemkomdigi melalui penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Harapannya, SDM Indonesia memahami tren global di bidang teknologi dan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan menumbuhkan SDM dengan skill digital yang berdaya saing yang pada akhirnya menjadi aktor penggerak untuk dapat mendukung kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia.

2.2 Misi Kementerian Komunikasi dan Digital

1. Mempercepat tersedianya konektivitas digital yang inklusif, berkualitas dan terjangkau, termasuk ekosistem teknologi aman dan berkelanjutan;
2. Menetapkan tata kelola digital yang selaras untuk kepentingan ekonomi nasional, kedaulatan dan kemandirian digital;
3. Mengakselerasi adopsi dan meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi digital diseluruh aspek, yaitu pemerintah, ekonomi, dan masyarakat dengan kolaborasi *pentagelix*;
4. Menyelenggarakan komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan informasi publik yang akuntabel dan terpercaya.

BPSDM Komdigi melaksanakan misi Kemkomdigi nomor 3 : Mengakselerasi adopsi dan meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi digital diseluruh aspek, yaitu pemerintah, ekonomi, dan masyarakat dengan kolaborasi *pentagelix*, dengan upaya:

1. Meningkatkan talenta digital berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Upaya ini dilakukan untuk mengatasi mismatch antara kualitas SDM dengan kebutuhan industri digital yang memiliki perubahan begitu cepat. Peningkatan kualitas ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan sebagai institusi penting bagi peningkatan kualitas SDM. Dengan upaya ini, maka Indonesia dapat menghasilkan SDM dengan skill digital yang berdaya saing dan mampu mendukung kedaulatan dan kemandirian digital.

2. Mengakselerasi adopsi skill digital kalangan pimpinan aparatur

Dengan mengakselerasi adopsi digital di kalangan pimpinan aparatur, akan tercipta institusi yang mengedepankan transformasi digital yang andal dan aman. Hal ini dikarenakan pimpinan aparatur adalah aktor penting dalam transformasi digital pada institusi pemerintah. Mereka merupakan penggerak dan inisiator dalam sebuah institusi yang memiliki pengaruh besar.

3. Meningkatkan literasi digital bagi kelompok masyarakat lainnya guna memperkuat kapasitas pemanfaatan teknologi digital secara produktif, aman, dan berkelanjutan

Peningkatan literasi digital bagi kelompok masyarakat lainnya merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, aman, dan berkelanjutan. Upaya ini diarahkan tidak hanya pada penguasaan keterampilan teknis dasar, tetapi juga pada pemahaman etika digital, keamanan informasi, serta kemampuan berpikir kritis dalam mengakses dan mengelola informasi. Melalui pelaksanaan program pelatihan, edukasi, dan pendampingan yang terstruktur dan inklusif, diharapkan kelompok masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan teknologi di ruang digital.

3. Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan data SDM digital dan Standar Kompetensi Digital.

Upaya ini menggambarkan bahwa kedepannya BPSDM Komdigi tidak hanya unit eselon 1 di bawah Komdigi yang menjalankan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas skill digital. Namun juga memberikan dampak yang lebih luas dengan menciptakan pemanfaatan data dan standar kompetensi digital yang dapat digunakan oleh seluruh institusi pendidikan maupun pelatihan terkait digital.

2.3 Tujuan BPSDM Komdigi

Tujuan Kementerian Komdigi

Menciptakan Konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan berdaulat

Indikator Tujuan:

1. Indeks Transformasi Digital Nasional

2. Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator tujuan tersebut, BPSDM Komdigi sesuai dengan tugas dan fungsinya, melaksanakan berbagai upaya strategis melalui akselerasi peningkatan kualitas dan produktivitas masyarakat digital yang diwujudkan melalui implementasi berbagai program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran strategis.

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Kementerian Komdigi menetapkan sembilan sasaran strategis selama periode 2025-2029, yaitu:

1. Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau
2. Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional
4. Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital
5. Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric
6. Menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi
8. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik
9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien

BPSDM Komdigi berperan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital, sehingga mendukung beberapa sasaran strategis yaitu :

1. Sasaran Strategis 4 : Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital
2. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi

3. Sasaran Strategis 9 : Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien

Dalam upaya untuk mencapai seluruh sasaran strategis yang ditetapkan, telah diidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi risiko terhadap ketercapaian sasaran tersebut. Berikut pemetaan identifikasi indikasi risiko untuk setiap sasaran strategis Kemkomdigi pada BPSDM Komdigi.

Sasaran Strategis 4 : Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital	
Indikasi Risiko	Perlakuan risiko
Ketimpangan Kompetensi digital antar wilayah dan sektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pelatihan dan modul pembelajaran berdasarkan kebutuhan 2. Melakukan kerjasama dengan berbagai sektor untuk mendukung peningkatan kompetensi digital 3. Melakukan survei terkait penilaian tingkat literasi, keterampilan, dan pemberdayaan digital masyarakat Indonesia 4. Menyelaraskan program Kemenkomdigi dengan agenda digitalisasi lintas sektor di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung peningkatan kompetensi digital nasional 5. Meningkatkan relevansi standar kompetensi bidang komdigi dengan industri
Penyebaran Disinformasi dan Polarisasi Sosial/Kurangnya kecakapan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara aman dan etis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pelatihan untuk peningkatan literasi digital masyarakat Indonesia 2. Melakukan kerjasama dengan berbagai sektor untuk mendukung peningkatan literasi digital 3. Melakukan survei terkait penilaian tingkat literasi, keterampilan, dan pemberdayaan digital masyarakat Indonesia 4. Memfasilitasi peningkatan literasi digital bagi kelompok rentan dan

	anak
Kurangnya Kompetensi Digital Aparatur di Era Digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pelatihan dan pengembangan kurikulum yang adaptif untuk peningkatan kompetensi digital aparatur Indonesia 2. Melakukan kolaborasi dengan industri dan akademisi dalam upaya peningkatan kompetensi digital ASN 3. Melakukan survei pengukuran untuk mengukur tingkat kompetensi digital ASN Nasional

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi	
Indikasi Risiko	Perlakuan risiko
Realisasi PNBP tidak optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pencatatan, pemungutan, dan pelaporan PNBP berbasis digital 2. Sinkronisasi dan integrasi data antar sistem internal dan eksternal agar data valid dan update 3. Sosialisasi regulasi, penguatan mekanisme penagihan dan penerapan sanksi atas keterlambatan/ketidakpatuhan 4. Memperkuat budaya anti korupsi, pelayanan prima dan zona integritas serta, serta evaluasi tarif 5. Memperkuat penerapan SOP pelayanan publik terkait izin penggunaan frekuensi radio 6. Melakukan audit kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penyetoran PNBP

Tabel 2.1 Identifikasi Indikasi Risiko Sasaran Strategis dukungan BPSDM Komdigi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pemerintah memiliki Visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi Indonesia Emas 2045 tersebut diwujudkan melalui pencapaian sasaran-sasaran dan indikator pembangunan yang ditetapkan melalui Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam RPJPN 2025-2045 tersebut Visi Indonesia Emas dituangkan ke dalam 5 sasaran, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan yang mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran pembangunan berfokus kepada upaya transformasi super prioritas (*game changers*) dari lima agenda pembangunan RPJPN 2025-2045 yang meliputi: (1) Transformasi Sosial, (2) Transformasi Ekonomi, (3) Transformasi Tata Kelola, (4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Kemkomdigi menjalankan peran strategis sebagai regulator dan fasilitator dalam bidang komunikasi dan digital nasional.

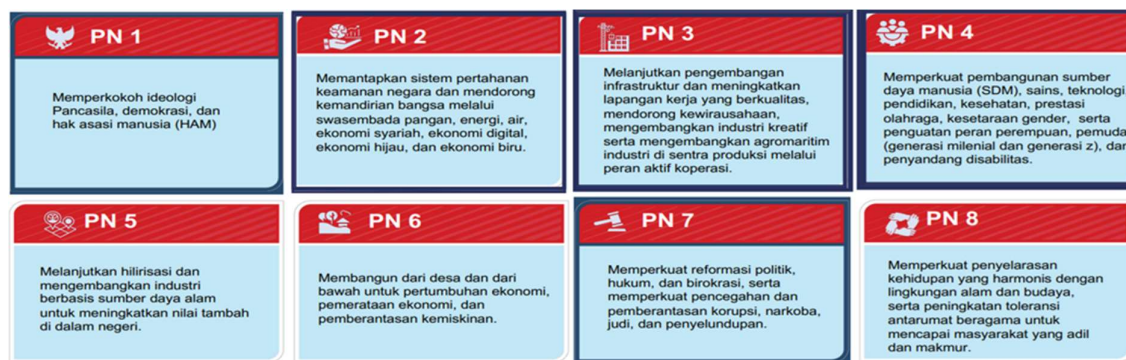
Kemkomdigi sebagai *leading sector* di ekonomi digital bertanggung jawab secara langsung untuk mewujudkan transformasi digital nasional sebagai bagian dari Transformasi Ekonomi serta mewujudkan pembangunan komunikasi publik. Transformasi digital dicapai melalui pengembangan *super platform*. Untuk mendukung hal tersebut, arah kebijakan transformasi digital diarahkan pada penguatan *supply*, penguasaan teknologi, dan penguatan *demand*. Sementara pembangunan komunikasi publik difokuskan pada peran komunikasi yang efektif untuk mendukung setiap aspek transformasi, terutama pada transformasi sosial dan transformasi tata kelola. Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat serta membangun kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, diarahkan penyediaan

komunikasi publik yang responsif terhadap dinamika sosial-budaya dan penyebaran informasi yang relevan dalam mendukung penciptaan masyarakat yang partisipatif dan terinformasi.

Pada tahapan periodisasi pembangunan jangka menengah pada tahap I (2025-2029) yang terutang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menekankan pada penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia berkualitas serta pertumbuhan berkelanjutan, dengan 5 (lima) sasaran utama pembangunan : (1) Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju; (2) Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang; (3) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat; (4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; dan (5) Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission.

Dalam mendukung ketercapaian sasaran tersebut, terdapat 8 Prioritas Nasional (PN). Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Bappenas, Kemkomdigi akan berperan besar untuk mendukung PN1, PN 2, PN 3, selain itu Kemkomdigi juga turut berperan mendukung PN lain seperti PN 7 yang berkaitan dengan pemerintahan digital.

Sedangkan BPSDM Komdigi berperan mendukung pada PN 1, PN 2, PN 3 selain itu juga turut berperan mendukung PN lain seperti PN 4 dan PN 7.



Gambar 3.1 Prioritas Nasional 2025-2029

Sumber: Bappenas, 2025

- Dalam mendukung PN 1, BPSDM Komdigi berperan untuk peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika yang bertalenta digital.
- Dalam mendukung PN 2, BPSDM Komdigi berperan untuk pengembangan SDM digital dan digitalisasi masyarakat.

- Dalam mendukung PN 3, BPSDM Komdigi berperan untuk pengembangan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan.
- Dalam mendukung PN 4, BPSDM Komdigi berperan untuk peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan
- Dalam mendukung PN 7, BPSDM Komdigi berperan untuk penguatan teknologi pemerintah digital yang berkualitas dan tangguh

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemkomdigi

Arah kebijakan dan strategi Kemkomdigi 2025 – 2029 dirancang untuk mendukung pencapaian delapan Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana yang terdapat dalam RPJMN 2025 – 2029, sesuai dengan tugas dan fungsi KemKomdigi di bidang komunikasi dan informatika. Rencana strategis KemKomdigi akan difokuskan untuk mendukung terwujudnya transformasi digital nasional yang diturunkan pada PN 1, PN 2, PN 3 selain itu Kemkomdigi juga turut berperan mendukung PN lain seperti PN 7 yang berkaitan dengan pemerintahan digital pada periode RPJMN 2025 - 2029.

Indikator-indikator dalam RPJMN 2025-2029 tersebut kemudian diadopsi dan diturunkan ke tingkat Komdigi dalam bentuk sasaran strategis dan program serta sasaran program yang kemudian menjadi tanggung jawab satuan kerja di bawahnya.

Dalam berbagai dokumen perencanaan ke depan, Akselerasi digital merupakan elemen penting untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Transformasi ini tidak hanya sebagai pendorong kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan daya saing bangsa di tengah persaingan global yang semakin kompleks. Dengan akselerasi digital, Indonesia diharapkan mampu memperkuat berbagai sektor ekonomi, memperluas inklusi digital, serta memanfaatkan potensi besar dari ekonomi berbasis teknologi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, program Kemenkomdigi akan dirancang untuk mencapai pengembangan ekosistem digital yang produktif, ruang digital yang aman bagi masyarakat, dan masyarakat yang siap dengan era digital masa depan. Program ke depan akan tidak hanya dilakukan untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, namun juga dilakukan untuk pengembangan ekosistem digital di berbagai wilayah dengan mendorong transformasi digital di seluruh sektor termasuk pemerintah, ekonomi, dan pembangunan SDM digital, sehingga ekonomi digital di daerah bisa secara bertahap

bertumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya berkontribusi pertumbuhan ekonomi nasional.

3.2.1 Konektivitas Digital

a. Broadband

Dalam agenda perencanaan Kemenkomdigi lima tahun ke depan (2025-2029), kebijakan bidang broadband diarahkan untuk mencapai konektivitas broadband yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun lima sasaran program yaitu:

1. Meningkatnya coverage broadband yang menjangkau ke seluruh Indonesia
2. Meningkatnya penetrasi dan utilisasi (take-up) internet broadband
3. Meningkatnya kualitas internet broadband nasional
4. Meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center yang berkelanjutan
5. Meningkatnya pengembangan industri perangkat digital yang aman

b. Jaringan komunikasi layanan khusus

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), selain fokus pada penyediaan konektivitas broadband yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia, terdapat pula arah strategis untuk mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi layanan khusus yang mencakup percepatan integrasi sistem kebencanaan dan kedaruratan, serta penyediaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk mendukung kebutuhan layanan khusus.

3.2.2 Ekosistem Digital

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional

Dalam agenda perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, kebijakan pada bidang ekonomi digital diarahkan melalui sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional. Selain untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2045, agenda ini juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi Komdigi dalam pertumbuhan ekonomi digital nasional. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung program tersebut adalah :

1. Meningkatnya penciptaan nilai ekonomi digital dengan penguatan ekosistem digital nasional
2. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan AI dan teknologi baru di sektor strategis nasional
3. Meningkatnya pertumbuhan industri pos logistik dan penyiaran
4. Pengelolaan data dan pengendalian bidang ekosistem digital

3.2.3 Pemerintah Digital

a. Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025 – 2029), pemerintahan berbasis digital dan pengembangan sistem smart government menjadi kunci dalam mereformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.. Untuk mewujudkan hal tersebut disusun dua sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital
2. Mengakselerasi transformasi digital daerah

3.2.4 Pengawasan Ruang Digital

a. Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), keamanan dan kedaulatan ruang digital menjadi elemen kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing. Oleh karena itu, arah kebijakan bidang pengawasan ruang digital difokuskan pada penguatan sistem keamanan negara dan terciptanya kesetaraan di ruang digital. Untuk mewujudkan hal tersebut disusun dua sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatkan pengawasan dan kesetaraan di ruang digital
2. Menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi aktivitas dan transaksi masyarakat

3.2.5 SDM dan Masyarakat Digital

Salah satu komponen penting dalam mendukung ekonomi digital adalah pembangunan SDM digital. Sehingga arah kebijakan pada periode 2025-2029 akan difokuskan pada percepatan peningkatan kualitas dan produktivitas masyarakat, dengan berbagai upaya strategis, yaitu:

1. Akselerasi pengembangan kompetensi digital SDM nasional sesuai dengan kebutuhan industri ke depan
2. Mempercepat akselerasi kompetensi SDM aparatur dan kepemimpinan digital
3. Mengakselerasi masyarakat digital untuk bijak dan produktif dalam penggunaan internet

3.2.6 Komunikasi Publik dan Media

Arah kebijakan komunikasi publik pada periode 2025-2029 akan difokuskan untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi yang inklusif dan berkualitas. Peran strategis Kemkomdigi dalam mendukung pencapaian prioritas nasional melalui komunikasi publik yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan komunikasi publik nasional
2. Meningkatnya kapatanuhan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik

3.2.7 Kuasi Publik

Pada periode 2025-2029, Kemkomdigi turut berperan dalam menaungi tiga lembaga kuasi publik yaitu Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers, khususnya pada sisi penyelenggaraan kesekretariatan dan penganggaran, sedangkan secara substansi, ketiga komisi tersebut memiliki tanggungjawab kinerja secara langsung kepada Presiden sesuai mandat yang diatur dalam perundang-undangan dimasing-masing lembaga. Dalam penyelenggaraan komunikasi publik melalui lembaga kuasi menekankan pada peningkatan kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi, media massa memiliki fungsi dalam penyebaran informasi publik dan menjaga akuntabilitas melalui jurnalisme yang bertanggungjawab.

3.2.8 Dukungan Manajemen

Transformasi internal melalui penguatan manajemen adaptif dan resilien menjadi fondasi utama Kemkomdigi mendukung pencapaian tujuan pembangunan digital nasional. Transformasi internal akan diarahkan untuk membangun tata kelola yang responsif terhadap perubahan. Dengan manajemen yang adaptif akan mampu mengantisipasi tantangan serta menyesuaikan strategi dan operasional secara tepat waktu, dan dengan manajemen yang resilien akan ditekankan pada ketahanan organisasi dalam menghadapi krisis dan disrupsi. Adapun sasaran strategis yang akan dilakukan, yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional
2. Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama internasional dalam memperkuat transformasi digital bermakna

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPSDM Komdigi

Arah kebijakan dan strategi BPSDM Komdigi disusun sebagai acuan program kerja yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan mencapai amanat sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan bertumpu kepada tugas dan fungsi BPSDM berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Komunikasi dan Digital. BPSDM Komdigi sebagai satuan kerja Kemenkomdigi diberikan tanggungjawab dalam menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informatika, dan digital. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut BPSDM Komdigi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital;
- b) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital;
- c) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital;
- d) pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Penyusunan arah kebijakan dan strategi dilakukan melalui analisis mendalam terhadap aspek internal dan eksternal BPSDM Komdigi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang meliputi tren, permasalahan, dan potensi pengembangan organisasi ke depan. Selain itu, arah kebijakan dan strategi yang disusun melalui pendekatan yang menggabungkan perspektif satuan-satuan kerja BPSDM Komdigi dan UPT di wilayah-wilayah strategis yang representatif. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa dapat didesain kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan kondisi riil yang membutuhkan intervensi kebijakan serta bersifat implementatif pada pelaksanaannya.

Intervensi BPSDM Komdigi terbagi dalam beberapa arah kebijakan, menggambarkan dua komponen utama pengembangan SDM digital nasional: kelompok talenta digital dan peran BPSDM Komdigi. Pada kelompok talenta terbagi ke dalam tiga jenis talenta digital, yaitu pengembangan talenta digital untuk kebutuhan industri, talenta digital pemerintah (ASN) dan talenta digital yang bijak dan produktif. Lebih jauh lagi, arah kebijakan dan strategi yang disusun memberikan sorotan tidak hanya pada peran

BPSDM Komdigi dalam menyelenggarakan pelatihan tetapi juga peran sebagai perumusan kebijakan dan membangun ekosistem pelatihan digital nasional.

Arah Kebijakan 1: Akselerasi Pengembangan kompetensi digital SDM sesuai kebutuhan industri ke depan

Arah kebijakan ini berfokus pada upaya pengembangan kompetensi dan meningkatkan ketersediaan talenta digital yang berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan industri. SDM akan dibekali dengan keterampilan digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi yang terus berkembang. Fokus strategi pada arah kebijakan ini adalah akses terhadap pelatihan keterampilan digital dan pendidikan digital. Termasuk pada arah kebijakan ini adalah pengembangan sertifikasi dan pendidikan tinggi berbasis vokasi oleh Komdigi. Pelaksanaan arah kebijakan ini dilakukan dengan:

a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Talenta Digital

Strategi	Deskripsi
Ketersediaan materi dan akses pelatihan digital untuk seluruh masyarakat	Penyenggaraan pelatihan SDM digital nasional
	Pemberian beasiswa bidang komdigi bagi masyarakat
	Penyusunan materi pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan pelatihan
	Penyediaan Platform sebagai strategi transformasi SDM Digital dalam ekosistem pembelajaran digital
Pemberdayaan talenta digital Indonesia	Pemberian kesempatan magang, penyaluran kesempatan kerja
	Menjalin kolaborasi pembinaan talenta AI unggulan Indonesia melalui program <i>Artificial Intelligent Talent Factory</i> (AITF)

b. Meningkatnya SDM Vokasi yang Bertalenta Digital

Strategi	Deskripsi
----------	-----------

Meningkatkan kualitas SDM digital melalui pendekatan kerangka kerja nasional	Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang komunikasi dan digital
	Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi untuk pelaksanaan pelatihan digital

c. Meningkatnya relevansi standar kompetensi bidang komdigi dengan industri

Strategi	Deskripsi
Mengembangkan kerangka kerja nasional untuk mendukung ekosistem SDM komunikasi dan digital	Penyusunan kerangka kebijakan standar kompetensi SDM digital seperti rancangan SKKNI/KKNI dan peta okupasi bidang komunikasi dan digital
	Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan standar kompetensi bidang komunikasi dan digital
	Mendorong stakeholders memanfaatkan standar kompetensi

d. Meningkatnya pemanfaatan data SDM digital dalam perencanaan dan kebijakan SDM digital nasional

Strategi	Deskripsi
Optimalisasi pengumpulan dan sinkronisasi data untuk pemanfaatan data SDM digital	Pengolahan dan analisis data SDM digital melalui pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
	Mengelola layanan dan pengembangan fitur sistem informasi untuk pengembangan SDM digital nasional

	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas data SDM digital
	Melakukan pengelolaan, pengolahan, analisis data, serta diseminasi informasi SDM digital

- e. Mewujudkan transformasi pendidikan tinggi bidang komdigi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja

Strategi	Deskripsi
Meningkatkan lulusan dengan kompetensi digital yang sesuai dengan kebutuhan industri	Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi Kementerian Komdigi
	Penyelenggaraan penelitian, inovasi dan pengabdian masyarakat
	Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang diselenggarakan Kemkomdigi
	Penyelenggaraan kerjasama dengan industri digital

- f. Memperkuat ekosistem platform digital yang dapat mendukung program pengembangan kompetensi digital SDM

Strategi	Deskripsi
Peningkatan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur platform pelatihan digital	Pengembangan dan optimalisasi platform SDM digital
	Penerapan standar kualitas layanan melalui sertifikasi standar terkait, untuk platform SDM digital

	Penguatan tata kelola Teknologi Informasi untuk menjamin keamanan, keandalan, dan keberlanjutan layanan
	Penguatan kolaborasi dan integrasi data dalam ekosistem pengembangan SDM digital

Arah Kebijakan 2 : Mempercepat akselerasi kompetensi sdm aparatur dan kepemimpinan digital

Arah kebijakan ini berorientasi pada pengembangan keterampilan digital ASN dan keterampilan kepemimpinan digital. Pengembangan keterampilan digital bagi ASN ditujukan untuk mengembangkan SDM digital pemerintah yang berketerampilan digital sebagai pondasi transformasi digital di pemerintahan, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Namun, terdapat tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan keterampilan digital di kalangan ASN yang membuat adopsi teknologi digital berjalan dengan lambat. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan digital yang mencakup penguasaan teknologi dasar hingga tingkat lanjut, serta akses terhadap modul-modul pembelajaran digital yang relevan dan mudah diakses oleh ASN di seluruh wilayah baik tingkat pusat maupun daerah. Di samping itu, pelatihan kepemimpinan ASN digital juga diperlukan untuk memastikan agar para pemimpin dapat memfasilitasi proses transformasi digital secara lebih optimal.

a. Meningkatnya Kompetensi Aparatur di Era Digital

Strategi	Deskripsi
Meningkatkan kualitas dan akses pelatihan digital bagi seluruh ASN	Perencanaan dan pelaksanaan pelatihan digital bagi seluruh ASN
	Kolaborasi dengan industri dan akademisi dalam penyelenggaraan

	pelatihan digital
	Penyediaan akses materi pembelajaran untuk mendukung self-paced learning
	Pemberian pelatihan untuk jabatan fungsional bidang komdigi

b. Meningkatnya Keterampilan Aparatur Kemenkomdigi di Era Digital

Strategi	Deskripsi
Penyediaan pelatihan digital bagi seluruh ASN Kemenkomdigi	Merencanakan dan melaksanakan pelatihan digital bagi ASN Kemenkomdigi
	Kolaborasi dengan industri, lembaga dan akademisi dalam penyelenggaraan pelatihan digital

c. Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan SDM Aparatur

Strategi	Deskripsi
Penyediaan pelatihan kepemimpinan digital bagi aparatur	Pengembangan kurikulum pelatihan kepemimpinan digital yang adaptif
	Kemitraan dengan institusi pendidikan dan privat dalam menyelenggarakan pelatihan

Arah Kebijakan 3 : Mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa produktif dan bijak dalam menggunakan internet

Arah kebijakan ini berorientasi pada percepatan transformasi digital masyarakat Indonesia. Dalam era transformasi digital yang semakin pesat tersebut, penggunaan teknologi oleh masyarakat tidak hanya menjadi tanda kemajuan teknologi di suatu wilayah, tetapi juga mencerminkan seberapa jauh masyarakat tersebut dapat beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-harinya. Namun, kemajuan dan kemudahan teknologi ini juga membawa tantangan tersendiri seperti

penggunaan teknologi yang belum digunakan untuk hal-hal yang produktif dan peningkatan kualitas hidup. Lebih lanjut, saat ini terdapat peningkatan penyalahgunaan internet yang terlihat dari maraknya praktik judi online, penyebaran hoaks, konten negatif, ujaran kebencian, dan konten yang merugikan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah strategis melalui pemberian literasi digital sesuai kebutuhan masyarakat yang mencakup etika, budaya, dan keamanan, serta pelatihan keterampilan digital yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu, literasi digital juga perlu diarahkan untuk kelompok-kelompok masyarakat agar pelaksanaannya dapat merata dan inklusif.

Meningkatnya Keterampilan Digital Dasar dan Literasi Digital Masyarakat untuk Produktivitas

Strategi	Deskripsi
Perluasan akses literasi digital dan pelatihan keterampilan digital masyarakat	Menyelenggarakan pelatihan keterampilan digital dasar untuk masyarakat
	Meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk anak dan kelompok rentan
	Penyelenggaraan Training of Trainers (TOT) kepada pandu digital yang dapat membantu dalam perluasan penyebaran literasi digital kepada masyarakat

Selain menetapkan arah kebijakan untuk SDM dan masyarakat, diperlukan juga menetapkan arah kebijakan untuk interdal BPSDM Komdigi, yaitu terkait dengan tata kelola dan dukungan manajemen.

Arah Kebijakan: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di BPSDM Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional

Untuk mendukung transformasi digital, diperlukan pengelolaan dan penguatan birokrasi yang efisien, adaptif dan berorientasi pada hasil.

a. Meningkatnya kualitas tata kelola BPSPDM Komdigi yang efektif dan efisien

Strategi	Deskripsi
Peningkatan SDM yang Berakhlak	Melaksanakan manajemen ASN BPSPDM Komdigi yang meliputi perencanaan, pengadaan, promosi, mutasi, manajemen kinerja, disiplin, penghargaan, perlindungan, pelayanan, implementasi core value ASN
	Penyenggaraan pengembangan ASN BPSPDM Komdigi
Peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang tepat fungsi	Melakukan penyusunan proses bisnis, SOP, dan penyesuaian sistem kerja yang selaras dengan aturan perundang-undangan
	Melaksanakan perencanaan dan evaluasi terkait dengan tata kelola organisasi
Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran	Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran
	Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran
	Melakukan singkronisasi perencanaan dan penganggaran
Peningkatan sinergitas dengan stakeholder	Menyenggarakan kerjasama baik dengan pemerintah atau non pemerintah dibidang komdigi
Peningkatan tata kelola keuangan yang akuntabel	Menyenggarakan pengelolaan keuangan melalui koordinasi pelaksanaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, pembinaan perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan secara berkala
	Melaksanakan pengelolaan administrasi pengelolaan belanja operasional, termasuk melaksanakan pemantauan dan evaluasinya

Peningkatan tata kelola Barang Milik Negara yang akuntabel	Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan teknis Barang Milik Negara (BMN) yang mencakup pencatatan, pelaporan, penilaian, penghapusan, serta pemantauan efektivitas pemanfaatan aset di BPSDM Komdigi
Penguatan tata kelola layanan umum yang efektif dan efisien	Melaksanakan tata usaha pimpinan
	Pengelolaan sarana dan prasarana serta perlengkapan
	Melaksanaan publikasi dan kehumasan
	Melaksanaan tata kelola kearsipan

b. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STMM yang Bersih dan Efisien

Strategi	Deskripsi
Peningkatan SDM STMM yang Berakhlak	Melaksanakan manajemen ASN STMM yang meliputi perencanaan, pengadaan, promosi, mutasi, manajemen kinerja, disiplin, penghargaan, perlindungan, pelayanan
	Penyelenggaraan pengembangan ASN STMM
Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran	Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran
	Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran
	Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
Peningkatan tata kelola keuangan yang akuntabel	Menyenggarakan pengelolaan keuangan
	Melaksanakan pengelolaan administrasi pengelolaan belanja operasional

Penguatan tata kelola layanan umum yang efektif dan efisien	Melaksanakan tata usaha perlengkapan dan rumah tangga
---	---

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengembangan SDM digital nasional, dibutuhkan kerangka regulasi sebagai payung hukum. Kerangka regulasi tersebut mencakup perubahan, pencabutan, dan/atau pengesahan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan strategis, proses bisnis, dan pelaksanaan kinerja BPSDM Komdigi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan kerangka regulasi utamanya mempertimbangkan urgensi yang didasarkan kepada evaluasi regulasi yang sudah ada dan pelaksanaannya, serta kebutuhan pengembangan ke depan merespons perubahan yang sudah dan akan terjadi di masa depan. Selain itu, penyusunan kerangka regulasi ke depan harus mempertimbangkan kebutuhan kerja sama dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, khususnya yang terkait dengan peran Komdigi—dalam hal ini BPSDM Komdigi—sebagai *leading sector* dalam hal pengembangan standar dan keterampilan SDM digital nasional baik di pemerintahan, industri, bisnis, dan masyarakat luas.

Adapun kerangka regulasi yang diperlukan dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan diantaranya sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Corporate University Kementerian Komunikasi dan Digital, peraturan ini penting sarana sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi.
2. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk Pengembangan SKKNI Bidang Komdigi, saat ini belum ada peta jalan atau rencana induk resmi yang ditetapkan oleh instansi teknis pembina sektor kominform mengenai pengembangan SKKNI di bidang Komdigi secara keseluruhan.
3. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi, hal ini penting terkait dengan pemberlakuan SKKNI melalui Menteri

pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Kominfo terbitan tahun 2025 sampai dengan 2029.

Selain penyusunan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan SDM, BPSDM Komdigi juga ikut berperan dalam regulasi dukungan manajemen dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di BPSDM Komdigi untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, responsif, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung transformasi digital nasional, yaitu terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Untuk dapat mewujudkan tercapainya visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dibutuhkan struktur kerangka kelembagaan yang efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja. Penyesuaian kerangka kelembagaan diperlukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan memastikan relevansi struktur organisasi dalam menjawab tantangan pembangunan. Bagi BPSDM Komdigi, hal tersebut dimaknai sebagai kewajiban untuk menyesuaikan kerangka kelembagaan dengan tupoksi BPSDM Komdigi ke depan, yaitu diantaranya sebagai pengemban fungsi perumusan kebijakan sekaligus pelaksana pengembangan SDM digital nasional. Program dan sasaran-sasaran yang ditetapkan berfungsi sebagai acuan penyusunan struktur organisasi dan prioritas alokasi sumber daya.

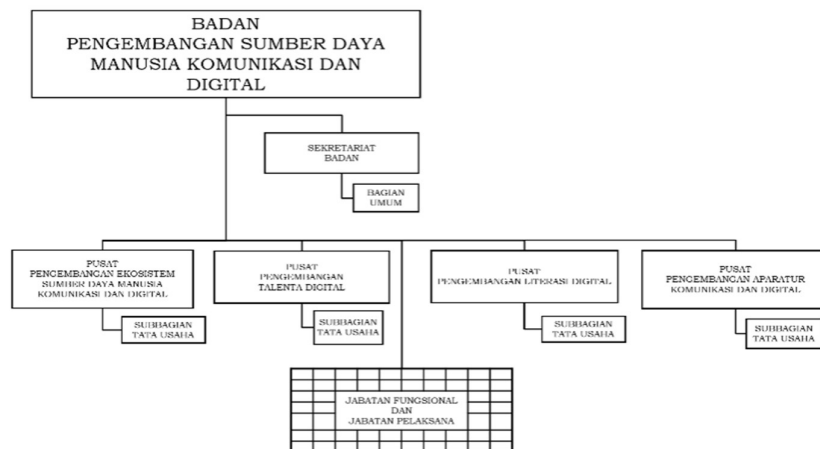
BPSDM Komdigi yang dipimpin oleh Kepala Badan berperan dalam rangka mendukung Menteri Komdigi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komdigi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam melaksanakan tugasnya, BPSDM Komdigi memiliki fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital;

2. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Badan dibantu oleh 5 (delapan) Satuan Kerja (Satker) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, terdiri atas:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital;
3. Pusat Pengembangan Talenta Digital;
4. Pusat Pengembangan Literasi Digital; dan
5. Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi BPSDM Komdigi Sesuai Permenkomdigi Nomor 1 Tahun 2025

Selain itu dalam mendukung pengembangan SDM digital terdapat 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 1 satuan pendidikan tinggi dan 9 UPT pengembangan

SDM. Masing-masing satuan kerja memiliki tupoksi dan target yang merepresentasikan aspek pengembangan keterampilan digital secara nasional. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terlepas dari perubahan kerangka kelembagaan dari masing-masing satuan kerja, fungsi dan tugas BPSDM Komdigi diharapkan dapat menyesuaikan dengan upaya pembangunan ekosistem pelatihan digital nasional. Ke depannya, BPSDM Komdigi dan satuan kerja di bawahnya akan bertransformasi untuk mengakomodir fokus pengembangan ekosistem pelatihan digital dan tidak hanya berperan sebagai pelaksana pelatihan melalui satuan kerja pelaksana teknis maupun satuan kerja eselon II.

3.5.1 Sekolah Tinggi Multi Media

STMM akan melaksanakan perubahan bentuk Sekolah Tinggi menjadi Politeknik dengan nama Politeknik Multimedia dan Digital Indonesia (PMDI) yang rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Perubahan kelembagaan tersebut, dilaksanakan dengan pemenuhan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2022 dimana PTKL menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian Lain atau LPNK. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya pada Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital juga mengalami transformasi tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital. Waktu penyelesaian perubahan bentuk Perguruan Tinggi dijadwalkan akan dilaksanakan pada akhir Tahun 2026 atau awal Tahun 2027 atau bisa lebih cepat setelah peresmian prodi-prodi baru di bidang keilmuan Digital dilaksanakan.



Gambar 3.4 Peta Jalan Capaian Renstra 2025-2029

Sekolah Tinggi Multi Media akan membuka 7 prodi baru antara lain:

- 1) Magister Terapan Kepemimpinan Digital (Kedinasan-Tugas Belajar),
- 2) Pendidikan Profesi Perekayasaan Digital (Kedinasan-Tugas Belajar),
- 3) Sarjana Terapan (D-IV) Rekayasa Infrastruktur Digital (Kedinasan-Ikatan Dinas),
- 4) Sarjana Terapan (D-IV) Layanan Publik Digital (Non Kedinasan),
- 5) Sarjana Terapan (D-IV) Teknologi Digital (Non Kedinasan),
- 6) Sarjana Terapan (D-IV) Komunikasi Media Digital (Non Kedinasan),
- 7) Sarjana Terapan (D-IV) Komunikasi dan Media Digital (Pembelajaran Jarak Jauh-Non Kedinasan)

3.5.2 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Saat ini telah disusun Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital disusun sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang menetapkan BRIN sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam penyelenggaraan fungsi penelitian.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, fungsi penelitian tidak lagi melekat pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.

Selain itu, Peraturan Menteri ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Kebijakan tersebut berdampak pada penataan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan SDM Komdigi, termasuk penyederhanaan struktur organisasi serta penyesuaian tugas dan fungsi jabatan Eselon III dan Eselon IV.

Dengan demikian, Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, serta ketentuan lain yang meliputi kedudukan, tata kerja, eselonisasi, dan Lokasi dan Wilayah Kerja guna mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi dan pengembangan sumber daya manusia digital.

Pokok Substansi yang Disepakati:

a. UPT di bawah BPSDM Komdigi ditetapkan terdiri dari :

1. Balai Besar Pelatihan SDM Komdigi (Medan dan Makassar); -
2. Balai Pelatihan SDM Komdigi (Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogya, Banjarmasin, Manado, Bekasi);
3. Balai Pelatihan Talenta Komdigi.

b. Lokasi UPT berdasarkan kota/kabupaten dan provinsi (Medan, Makassar, Jakarta, Bandung, Sidoarjo, Bantul, Banjarmasin, Manado, Bekasi)

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, Kemkomdigi menetapkan 9 sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kementerian dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program. Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program. Dari 9 sasaran strategis yang ditetapkan di Kemkomdigi, BPSDM Komdigi berperan dalam mendukung 3 sasaran strategis.

Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029

SS.04 - Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital					
IKSS 4.1 - Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	45,23	47,23	49,23	51, 23	53,23
IKSS 4.2 - Indeks TDN pilar Masyarakat	52,08	52,12	52,16	52,20	52,24
IKSS 4.3 - Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (kumulatif)	3,21%	3,71%	4,21%	4,71%	5,21%
IKSS 4.4 - Tingkat ASN yang memiliki kompetensi digital	-	1,80%	2,10%	2,40%	2,70%
SS. 07 - Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi					
IKSS.7.2 Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBK Kemenkomdigi	100%	100%	100%	100%	100%
SS. 09 - Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien					
IKSS. 9.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi	87	88	89	90	91

Tabel 4.1 Target Kinerja Kemkomdigi 2025-2029 terkait BPSDM Komdigi

Untuk mendukung pencapaian tersebut BPSDM Komdigi menetapkan 5 sasaran program, dengan 7 indikator kinerja sasaran program :

Sasaran Program (SP) / Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
SP 01 - Akselerasi pengembangan kompetensi digital sdm nasional sesuai kebutuhan industri ke depan					
01 - Nilai IMDI pada pilar pekerjaan	40,09	42,09	44,09	46,09	48,09
02 - Persentase (%) peningkatan tenaga kerja dengan keterampilan digital	6,5%	6,75%	7%	7,25%	7,5%
SP 02 - Mempercepat akselerasi kompetensi sdm aparatur dan kepemimpinan digital					

01 - Persentase (%) dampak pengembangan kompetensi digital ASN bagi organisasi	87%	87%	88%	88%	89%
02 - Persentase (%) dampak pengembangan kompetensi kepemimpinan digital ASN bagi organisasi	80%	80%	83%	85%	85%
SP 3 - Mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa produktif dan bijak dalam menggunakan internet					
01 - Nilai IMDI pada pilar literasi digital	60,25	62,25	64,25	66,25	68,25
02 - Proporsi remaja dan dewasa Usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK)	83%	85%	86%	88%	90%
SP 4. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang SDM Digital					
01 - Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Bidang Talenta Digital	100%	100%	100%	100%	100%
SP. 5 - Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Tranformasi Digital Nasional					
01 - Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi RB di BPSDM Komdigi Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.2 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode 2025-2029, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai. Alokasi belanja akan direncanakan secara sistematis dan terstruktur guna memastikan setiap rupiah memberikan dampak optimal. Penyusunan indikasi pendanaan periode 2025-2029 didasarkan pada kebutuhan anggaran untuk mencapai target yang ditetapkan dan disesuaikan dengan agenda pembangunan nasional serta program BPSDM Komdigi. Pendanaan di BPSDM Komdigi bersumber dari Rupiah Murni (RM), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), selain itu juga dimungkinkan sumber dana lainya seperti dari hibah dan lain sebagainya :

Program	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital	251,821	548,776	548,189	554,525	560,107
Program Dukungan Manajemen	185,395	269,881	226,022	237,296	249,261
Total	437,216	824,406	786,129	791,821	809,369

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPSDM Komdigi 2025-2029 (dalam Juta)

BAB V

PENUTUP

Renstra BPSDM Komdigi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029 untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang dalam pembangunan sumber daya manusia dibidang digital. Dimana dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen Renstra Kemkomdigi 2025-2029. Dokumen Renstra ini juga menjadi pedoman dalam mendorong dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, program, serta inovasi dalam pengembangan SDM digital yang disusun setiap tahun dalam Rencana Kerja (Renja).

Renstra ini diharapkan dapat menjadi wujud komitmen BPSDM Komdigi, dimana diperlukan komitmen seluruh jajaran BPSDM Komdigi dalam pemanfaatan teknologi digital dalam rangka menciptakan SDM digital yang berdaya saing dalam rangka menciptakan masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pengembangan SDM Komdigi 2025-2029

[illegible]

IKSS.9.1	01 - Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi	Penilaian oleh Kementerian PAN dan RB dilakukan untuk mengavaluasi kemajuan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Evaluasi ini berfokus pada aspek kelembagaan, tata kelola, dan SDM aparatur dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani. Penilaian dilakukan melalui RB General dan RB Tematik.	Non RPJMN	87 (Kementerian PAN&RB, 2024)	87	88	89	90	91	-	-	-	-	-
----------	--	--	-----------	----------------------------------	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pengembangan SDM Komdigi 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	Definisi	RPJMN /NON RPJMN	LOKASI RO	Baseline	TARGET					ALOKASI (dalam ribu rupiah)					SATUAN KERJA PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													548,776,701	548,189,952	554,525,087	560,107,342	
Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital																	
SS 4	SP 1	01 - Akselerasi pengembangan kompetensi digital sdm nasional sesuai kebutuhan industri ke depan															
IKSS 4.1	IKP 1.1	01 - Nilai IMDI pada pilar pekerjaan	Mengukur skor IMDI pada pilar pekerjaan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan digital, tingkat keterampilan digital, dan kesesuaian keterampilan digital pekerja dengan kebutuhan industri. Indikator ini diukur melalui skor IMDI pilar pekerjaan yang akan dilakukan oleh BPSDM Komdigi Rumus perhitungan: Rata-rata berdasarkan konversi nilai indikator masing-masing subpilar pembentuk pilar pekerjaan.	Non RPJMN	-	38,09 (Komdigi, 2024)	42.91	43.41	44.21	45.01	45.81	-	-	-	-	-	Pusbang Talenta Digital, Pusbang Ekosistem SDM Komdigi
IKSS 4.2	IKP 1.2	02 - Persentase (%) peningkatan tenaga kerja dengan keterampilan digital	Mengukur peningkatan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang dihitung berdasarkan tenaga kerja yang pernah mendapatkan pelatihan bidang TIK dan digital Rumus perhitungan: Membandingkan kenaikan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang dihitung berdasarkan tenaga kerja yang pernah mendapatkan pelatihan bidang TIK dan digital pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya	Non RPJMN	-	6,21% (2024)	6,5%	6,75%	7%	7,25%	7,5%	-	-	-	-	-	Pusbang Talenta Digital
SP 4	SP 2	02 - Mempercepat akselerasi kompetensi sdm aparatur dan kepemimpinan digital															
IKSS 4.4	IKP 2.1	Persentase (%) dampak pengembangan kompetensi digital ASN bagi organisasi	Mengukur proporsi kompetensi digital alumni peserta pelatihan berdasarkan hasil analisis dampak pelatihan pada organisasi melalui tracer study yang dilakukan oleh Pusbang Aparatur Komdigi	Non RPJMN	-	-	87%	87%	88%	88%	89%	-	-	-	-	-	Pusbang Aparatur Komdigi
IKSS 4.4	IKP 2.2	Persentase (%) dampak pengembangan kompetensi kepemimpinan digital ASN bagi organisasi	Mengukur proporsi kompetensi kepemimpinan digital alumni peserta pelatihan berdasarkan hasil analisis dampak pelatihan pada organisasi melalui tracer study yang dilakukan oleh Pusbang Aparatur Komdigi	Non RPJMN	-	-	80%	80%	83%	85%	85%	-	-	-	-	-	Pusbang Aparatur Komdigi
SS 4	SP 3	03 - Mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa produktif dan bijak dalam menggunakan internet															
IKSS 4.1	IKP 3.1	01 - Nilai IMDI pada pilar literasi digital	Mengukur kemampuan individu dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi, dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi. Indikator ini diukur melalui skor IMDI pilar literasi digital. Pengukuran ini akan dilakukan oleh BPSDM Komdigi Rumus perhitungan: Rata-rata berdasarkan konversi nilai indikator dan pembobotan masing-masing subpilar pembentuk pilar literasi digital.	Non RPJMN	-	-	60,25	62,25	64,25	66,25	68,25	-	-	-	-	-	Pusbang Literasi Digital, Pusbang Ekosistem SDM Komdigi
IKSS 4.1	IKP 3.2	02 - Proporsi remaja dan dewasa Usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK)	Ukuran statistik yang menggambarkan persentase populasi individu dalam rentang usia 15 hingga 59 tahun yang memiliki kemampuan atau keterampilan yang relevan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Data tersebut diperoleh dari BPS dan pengukuran akan dilakukan oleh BPSDM Komdigi	RPJMN	-	79% (BPS, 2023)	83%	85%	86%	88%	90%	-	-	-	-	-	Pusbang Literasi Digital
SS 7	SP 4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang SDM Digital															
IKSS 7.2	IKP 4.1	01 - Persentase Realisasi Penerimaan PNPB Bidang Talenta Digital	Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan dari layanan dan izin yang terkait dengan bidang talenta digital	Non RPJMN	-	22%(BPSDM, 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	Pusbang Aparatur Komdigi, STMM, BPPTIK

KEGIATAN 7449- Pengembangan Kompetensi Digital Bagi Masyarakat												153,124,447	153,339,465	153,554,483	153,769,501	
SP 8	SK 1	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM digital										153,124,447	153,339,465	153,554,483	153,769,501	
IKP 8.2	IKK 1.1	01 - Persentase peserta pelatihan digital yang terserap di lapangan pekerjaan dalam kurun waktu 1 Tahun	Jumlah alumni pelatihan yang terserap di lapangan pekerjaan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan peserta pelatihan pemberdayaan talenta digital dengan yang terserap di lapangan pekerjaan.	Non RPJMN	-	-	30%	30%	35%	35%	35%	-	-	-	-	
IKP 8.1	IKK 1.2	02 - Persentase (%) alumni beasiswa S2 dan S3 bidang komunikasi dan digital yang mengalami peningkatan karir dan produktivitas kerja	Mengukur proporsi peserta beasiswa S2 dan S3 bidang komdigi yang mengalami peningkatan karir dan/atau produktivitas kerja setelah lulus selama 2 tahun. Pengukuran dilakukan oleh Pusbang Talenta Digital. Rumus perhitungan: Pengukuran dilakukan dengan membandingkan kenaikan produktivitas kerja termasuk jenjang karir alumni sebelum dan setelah menyelesaikan pendidikan jalur beasiswa Kemkomdigi. Pengukuran survey dilakukan kepada alumni angkatan setelah lulus selama 2 tahun	Non RPJMN	-	-	30%	30%	30%	30%	30%	-	-	-	-	
IKP 8.2	IKK 1.3	03 - Persentase peserta pelatihan SDM bidang komdigi yang bertalenta digital	Indikator ini adalah indikator RPJMN yang diubah nomenklatur dan lingkup pengukurannya. Pada RPJMN nomenklatur indikator ini adalah Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang komdigi yang bertalenta digital, lalu diubah menjadi indikator pendukung yaitu Persentase peserta pelatihan SDM bidang komdigi yang bertalenta digital. Pengukuran dilakukan oleh Pusbang Talenta Digital. Rumus perhitungan: Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah peserta menyelesaikan dan lulus pelatihan (completion) dibagi peserta onboarding dari pelatihan yang dilakukan Pusbang Talenta Digital dan Satker/UPT	RPJMN	-	-	70%	70%	70%	70%	70%	-	-	-	-	
IKP 8.2	IKK 1.3	04- Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital		RPJMN		141,300 Orang (Bappenas, 2025)	40,100	200,300	200,300	200,300	200,300					
		Output - 1. Pemberdayaan Talenta Digital	Output ini merupakan pelaksanaan kegiatan intensif seperti bootcamp atau hackathon yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan peserta pelatihan di lapangan pekerjaan	RPJMN	Pusat dan wilayah kerja Pusat dan UPT BPSPDM	-	-	1.500 Orang	1.500 Orang	1.500 Orang	1.500 Orang	-	6,752,563	6,967,581	7,182,599	7,397,617
		Output - 2. Beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan digital	Pemberian beasiswa S2 bidang komunikasi dan digital untuk tahun angkatan baru dan tahun berjalan	RPJMN	Pusat	-	703 Orang	703 Orang	703 Orang	703 Orang	703 Orang	78,896,629	78,896,629	78,896,629	78,896,629	78,896,629
		Output - 3. Pelatihan talenta digital	Pelatihan talenta digital mencakup penyelenggaraan program peningkatan keterampilan dan kompetensi individu di bidang komunikasi dan digital. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup kegiatan Training of Trainers (ToT) yang diselenggarakan di Unit Pusat untuk membekali pelatih dengan kemampuan yang diperlukan dalam menyampaikan materi pelatihan secara efektif.	RPJMN	Pusat dan wilayah kerja UPT BPSPDM	-	-	53.240 Orang	53.240 Orang	53.240 Orang	53.240 Orang	-	61,975,255	61,975,255	61,975,255	61,975,255
		Output - 4. Digital Talent Scholarship	Pelaksanaan pelatihan talenta digital dengan mitra Global Technology Companies (GTC) dan mitra Edukasi Teknologi Lokal (Edutech) dengan sistem pelaksanaan secara daring, luring serta blended learning (daring dan luring).	RPJMN	Pusat dan wilayah kerja UPT BPSPDM	-	33.500 Orang	-	-	-	-	70,056,894	-	-	-	-
		Output - 5. Digital Talent Pool (DTP)	Digital Talent Pool (DTP) adalah ekosistem talenta digital terintegrasi berbasis data yang dirancang untuk mengidentifikasi, memetakan, dan memadankan talenta digital sesuai dengan kerangka kompetensi nasional yang terdapat dalam Peta Okupasi Nasional bidang TIK. Ekosistem ini akan menghubungkan individu bertalenta dengan berbagai peluang kerja, pelatihan, dan pengembangan karier berbasis teknologi informasi, sehingga mendorong akselerasi ekonomi digital nasional.	Non RPJMN	Pusat	-	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	3 Kelompok Masyarakat	4 Kelompok Masyarakat	-	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	
KEGIATAN 7658 - SDM Vokasi Bidang Komdigi												83,829,196	83,829,196	83,829,196	83,829,196	
SP 8	SK 1	01 - Meningkatnya SDM vokasi yang bertalenta digital										83,829,196	83,829,196	83,829,196	83,829,196	
IKP 8.1	IKK 1.1	Persentase peserta pelatihan yang lulus sertifikasi SKKNI	Indikator ini adalah indikator RPJMN yang diubah nomenklatur dan lingkup pengukurannya. Pada RPJMN nomenklatur indikator ini adalah Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang komdigi yang bertalenta digital, lalu diubah menjadi indikator pendukung Persentase peserta pelatihan yang lulus sertifikasi SKKNI. Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Talenta Digital Rumus perhitungan: Persentase peserta pelatihan yang lulus dan memperoleh sertifikasi SKKNI	RPJMN	-		92%	92%	93%	93%	93%	-	-	-	-	
		Output - 1. Pelatihan berbasis SKKNI bidang Komdigi	Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI. Pelaksanaan sertifikasi menunggu proses penyalarsan modul pembelajaran di perguruan tinggi telah selesai dan pelaksanaan sertifikasi bisa dilaksanakan setelah pembelajaran di perguruan tinggi selesai sesuai dengan kalender akademik serta pelaksanaan TOT	RPJMN	Pusat dan wilayah kerja UPT BPSPDM	-	-	25.000 Orang	25.000 Orang	25.000 Orang	25.000 Orang	-	83,829,196	83,829,196	83,829,196	83,829,196
		Output - 2. Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang kominfo, bekerja sama dengan stakeholders terkait.	RPJMN	Pusat dan wilayah kerja UPT BPSPDM	-	6.000 Orang	-	-	-	-	22,197,140	-	-	-	-
KEGIATAN 7451 - Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi												26,251,297	26,251,297	28,876,425	28,876,425	
SP 8	SK 1	01 - Meningkatnya relevansi standar kompetensi bidang komdigi dengan industri										4,329,190	4,329,190	4,762,109	4,762,109	
IKP 8.1	IKK 1.1	01 - Persentase pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi untuk mendukung pelatihan bidang komdigi	Mengukur proporsi rancangan SKKNI/KKNI dan peta okupasi yang diadopsi atau digunakan oleh stakeholders (lembaga pelatihan/LSP/lembaga pendidikan/industri). Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Ekosistem SDM Komdigi Komdigi Rumus perhitungan: Jumlah SKKNI/KKNI/PON yang telah memanfaatkan kemudian dibagi dengan jumlah Total SKKNI/KKNI/PON yang tersedia, sehingga didapatkan Rasio/Persentase Pemanfaatan SKKNI/KKNI/PON.	Non RPJMN	-		20%	30%	40%	50%	60%	-	-	-	-	
		Output - 1. Rancangan SKKNI/KKNI Bidang Komunikasi dan Digital	Penyusunan Rancangan SKKNI/KKNI bidang komunikasi dan digital	Non RPJMN	Pusat		3 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	1,094,950	2,749,380	2,749,380	3,024,318	3,024,318
		Output - 2. Peta Okupasi Nasional bidang komunikasi dan digital	Merupakan RO untuk memetakan Peta Okupasi bidang komdigi, kegiatan ini mencakup penyusunan rancangan peta okupasi bidang komdigi, penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan peta okupasi bidang komdigi, dan sosialisasi dan advokasi pemanfaatan peta okupasi bidang komdigi	Non RPJMN	Pusat	-	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	707,250	1,579,810	1,579,810	1,737,791	1,737,791

SP 8	SK 2	02 - Meningkatnya pemanfaatan data SDM digital dalam perencanaan dan kebijakan SDM digital nasional		Mengukur kepuasan masyarakat dalam memanfaatkan layanan data SDM Digital, meliputi layanan data dan informasi, serta layanan aplikasi Platform SDM Digital. Tata cara pengukuran merujuk PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Non RPJMN	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-	-	21,922,107	21,922,107	24,114,316	24,114,316		
IKP 8.1	IKK 2.1	01 - Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan data dan informasi SDM Komdigi	Rumus perhitungan: Nilai rata-rata per unsur pelayanan																
		Output - 1. OM Sistem informasi Pengembangan SDM Digital Nasional	Output ini merupakan output terkait operasional pemeliharaan aplikasi Platform SDM Digital yang dikelola oleh HPSPDM	RPJMN	Pusat	-	14 Unit	14 Unit	15 Unit	16 Unit	17 Unit	6,957,040	10,205,821	10,205,821	11,226,403	11,226,403			
		Output - 2. Pengembangan modul sistem informasi untuk Pengembangan SDM Digital Nasional	Output ini merupakan output terkait pengembangan aplikasi/fitur baru sistem informasi terkait SDM Digital Nasional	Non RPJMN	Pusat	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1,524,400	1,524,400	1,676,840	1,676,840			
		Output - 3. Layanan data dan informasi SDM Digital	Layanan penyediaan serta diseminasi data dan informasi terkait SDM Digital	Non RPJMN	Pusat	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	485,000	2,392,188	2,392,188	2,631,406	2,631,406			
KEGIATAN 7450 - Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur dan SP 9		SK 1	01 - Meningkatnya kompetensi aparatur di era digital	Output ini merupakan pengukuran dan analisis Pengukuran IMDI yang dilakukan tiap tahun	RPJMN	Pusat	-	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	6,030,042	7,799,698	7,799,698	8,579,667	8,579,667		
IKP 9.1	IKK 1.1	01 - Persentase (%) peserta aparatur yang dinyatakan lulus Pelatihan Jabatan Fungsional Bidang Komdigi	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi digital. Pengukuran dilakukan dengan peserta yang mendapatkan sertifikat dibandingkan dengan peserta yang mengikuti pelatihan	Non RPJMN	-	-	95%	95%	96%	96%	97%	-	-	-	-	-	-	-	
		02 - Persentase peserta pelatihan SDM aparatur bidang komdigi yang bertalenta digital	Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat /Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan x 100% Indikator ini adalah indikator RPJMN yang diubah nomenklatur dan lingkup pengukurannya. Pada RPJMN nomenklatur indikator ini adalah Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang komdigi yang bertalenta digital, lalu diubah menjadi indikator pendukung Persentase peserta pelatihan SDM aparatur bidang komdigi yang bertalenta digital. Indikator ini mengukur peserta pelatihan aparatur yang lulus mendapatkan sertifikasi.	RPJMN	-	87%	87%	87%	88%	88%	88%	-	-	-	-	-	-		
		Output - 1. Pelatihan Aparatur Digital	Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat /Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan x 100% Pelatihan teknis digital dan komunikasi digital untuk aparatur yang diselenggarakan oleh Pusdiklat (RM), serta pelaksanaan TOT	RPJMN	Pusat dan wilayah kerja UPT HPSPDM	-	-	20,000 Orang	20,000 Orang	20,000 Orang	20,000 Orang	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000			
		Output - 2. Kebijakan dan Modul Pelatihan Aparatur Digital	Output ini merupakan modul self paced learning pelatihan teknis digital	Non RPJMN	Pusat	-	-	12 Rekomendasi kebijakan	12 Rekomendasi kebijakan	15 rekomendasi kebijakan	15 rekomendasi kebijakan	-	1,826,430	1,826,430	1,826,430	1,826,430			
		Output - 3. Pelatihan Jabatan Fungsional Bidang Komdigi	Output ini merupakan pelatihan penguatan/penjenjangan fungsional untuk pejabat fungsional bidang Komdigi	Non RPJMN	Pusat	-	-	500 Orang	500 Orang	600 Orang	700 Orang	-	6,000,000	6,000,000	7,200,000	8,400,000			
SP 9	SK 2	02 - Meningkatnya keterampilan aparatur Kemkomdigi di era digital		Persentase ASN Kemkomdigi yang memiliki kompetensi digital. Pengukuran dilakukan dengan peserta yang mendapatkan sertifikat dibandingkan dengan peserta yang mengikuti pelatihan	Non RPJMN	-	-	93%	93%	93%	95%	95%	-	-	12,027,162	3,850,000	4,200,000	4,200,000	
IKP 9.1	IKK 2.1	01 - Persentase (%) Peserta Pelatihan ASN Kemkomdigi yang Lulus Pelatihan	Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan ASN Kemkomdigi yang mendapatkan sertifikat /Jumlah peserta pelatihan ASN Kemkomdigi x 100% Persentase penyelenggaraan pelatihan Aparatur Kemkomdigi dibandingkan dengan hasil HCDDP	Non RPJMN	-	-	93%	93%	93%	95%	95%	-	-	-	-	-	-	-	
		02 - Persentase penyelenggaraan diklat sesuai HCDDP	Rumus perhitungan: Jumlah penyelenggaraan pelatihan Aparatur Kemkomdigi /Penyelenggaraan pelatihan berdasarkan HCDDP x 100% Pelatihan manajerial, letter, orientasi CPNS, sosio kultural, teknis administratif, teknis digital, teknis fungsional bidang komdigi untuk aparatur di internal Kemkomdigi	Non RPJMN	Pusat	-	3.542 orang	3.342 orang	1.100 orang	1.200 orang	1.200 orang	17,791,685	12,027,162	3,850,000	4,200,000	4,200,000			
		Output - 1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Pengukuran dilakukan dengan peserta yang mendapatkan sertifikat dibandingkan dengan peserta yang mengikuti pelatihan	Non RPJMN	-	95%	95%	95%	95%	95%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Output - 2. Kebijakan dan Modul Pelatihan Aparatur Digital	Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan digital yang mendapatkan sertifikat /Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan digital x 100% Pelatihan PKN TK II dan DLA untuk pemimpin aparatur digital	RPJMN	Pusat	-	100 Orang	160 Orang	160 Orang	160 Orang	160 Orang	5,382,322	6,560,000	6,560,000	6,560,000	6,560,000			
IKP 9.2	IKK 3.1	03 - Meningkatnya kualitas kepemimpinan SDM aparatur		Mengukur persentase realisasi target PNPB di Pusbang Aparatur Komdigi	Non RPJMN	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	1,611,093	1,611,093	1,611,093	1,611,093	
SP 11	SK 4	01 - Persentase (%) Peserta Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Digital yang Memiliki Kompetensi Digital	Mengukur persentase realisasi target PNPB di HPPTIK	Non RPJMN	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	
		02 - Persentase (%) Realisasi Target PNPB HPPTIK	Pelatihan teknis digital atau teknis fungsional untuk aparatur yang diselenggarakan oleh Pusdiklat (PNP), serta pelaksanaan TOT	Non RPJMN	Pusat dan HPPTIK Kab. Bekasi	-	185 orang	180 orang	180 orang	180 orang	180 orang	1,967,005	1,611,093	1,611,093	1,611,093	1,611,093			
		Output - 1. Pelatihan Aparatur Digital Skema Pembiayaan PNPB	Indikator ini menetapkan target pencapaian Skor IMDI pada Pilar Literasi Digital bagi perempuan dan laki-laki dalam kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi, dan internet untuk mengakses serta mengelola informasi. Pengukuran ini akan dilakukan oleh HPSPDM Cq. Pusbang Ekosistem SDM Komdigi	RPJMN	-	-	3	3,2	3,4	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Output - 2. Fasilitas Literasi Digital	Indikator ini mengukur pengetahuan kelompok rentan terhadap literasi digital sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan literasi digital	Non RPJMN	-	-	75%	75%	75%	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	
IKP 10.1	IKK 1.1	01 - Indeks Literasi digital	Rumus perhitungan: Rata-rata berdasarkan konversi nilai indikator dan pembobotan masing-masing subpilar pembentuk nilai literasi digital	RPJMN	-	Laki-Laki: 3,56; Perempuan: 3,52 (2023)	Laki-Laki: 3,65; Perempuan: 3,60	Laki-Laki: 3,65; Perempuan: 3,64	Laki-Laki: 3,68; Perempuan: 3,68	Laki-Laki: 3,71; Perempuan: 3,72	Laki-Laki: 3,74; Perempuan: 3,76	-	-	-	-	-	-	-	
IKP 10.2	IKK 1.2	02 - Persentase peserta pelatihan keterampilan dasar yang mengalami peningkatan keterampilan digital	Indikator ini adalah indikator yang mendukung indikator RPJMN yang diubah nomenklatur dan lingkup pengukurannya. Pada RPJMN nomenklatur indikator ini adalah Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang komdigi yang bertalenta digital, lalu diubah menjadi indikator pendukung Persentase peserta pelatihan keterampilan dasar yang mengalami peningkatan keterampilan digital. Indikator ini mengukur peserta pelatihan keterampilan dasar yang mengalami peningkatan keterampilan digital setelah lulus pelatihan. Pengukuran dilakukan oleh Pusbang Literasi Digital	RPJMN	-	88.73%	88.73%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Output - 1. Pelatihan keterampilan digital dasar	Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat /Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan x 100% Indikator ini mengukur tingkat pemahaman anak terhadap literasi digital	Non RPJMN	-	-	3	3,2	3,4	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Output - 2. Fasilitas Literasi Digital	Rumus perhitungan: Melakukan survei terhadap peserta fasilitas literasi digital untuk anak	Non RPJMN	-	-	75%	75%	75%	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Output - 3. Pelatihan literasi digital	Indikator ini mengukur pengetahuan kelompok rentan terhadap literasi digital sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan literasi digital	Non RPJMN	-	-	75%	75%	75%	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	
IKP 10.1	IKK 1.3	03 - Tingkat pemahaman literasi digital pada anak	Rumus perhitungan: Jumlah jawaban benar dari post test yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan	Non RPJMN	-	-	100,000 peserta	100,000 peserta	100,000 peserta	100,000 peserta	-	106,600,000	106,600,000	106,600,000	106,600,000				
		Output - 2. Fasilitas Literasi Digital	Pusat melaksanakan TOT atau pilot project pelatihan dari tema/modul keterampilan digital dasar. Pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh UPT sesuai dengan kebijakan penerapan pelatihan keterampilan digital dasar di bawah koordinasi Pusat.	RPJMN	Pusat dan wilayah kerja UPT HPSPDM	-	300 Orang	-	-	-	-	14,688,100	-	-	-	-	-		
		Output - 3. Pelatihan literasi digital	Output ini merupakan output RPJMN untuk tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan fasilitas literasi digital meliputi kegiatan pengembangan modul kompetensi, pengembangan modul panduan literasi digital, inovasi literasi digital, pengembangan LMS, panduan literasi digital nasional	RPJMN	Pusat	-	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	-	16,156,800	16,156,800	16,156,800	16,156,800				
		Output - 4. Fasilitas literasi digital untuk anak	Output ini merupakan output RPJMN yang sama dengan Fasilitas literasi digital namun dengan target untuk tahun 2026-2029. Output ini akan berupa pelaksanaan Training of Trainers (TOT) atau pilot project pelatihan dari tema/modul level literasi digital	RPJMN	Pusat	-	1.070.000 Orang	1.070.000 Orang	1.070.000 Orang	1.070.000 Orang	-	53,500,000	53,500,000	53,500,000	53,500,000				
IKP 10.1	IKK 1.4	04 - Tingkat pemahaman literasi digital pada kelompok rentan	Output ini merupakan ulasan baru terkait dengan pelaksanaan fasilitas literasi digital yang menasar anak usia 7 - 18thn	Non RPJMN	Pusat	-	200,000 Orang	200,000 Orang	200,000 Orang	200,000 Orang	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000				
		Output - 1. Pelatihan keterampilan digital dasar	Output ini merupakan output RPJMN untuk tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan fasilitas literasi digital meliputi kegiatan pengembangan modul kompetensi, pengembangan modul panduan literasi digital, inovasi literasi digital, pengembangan LMS, panduan literasi digital nasional	RPJMN	Pusat dan wilayah kerja UPT HPSPDM	-	100,000 peserta	100,000 peserta	100,000 peserta	100,000 peserta	-	106,600,000	106,600,000	106,600,000	106,600,000				
		Output - 2. Fasilitas Literasi Digital	Output ini merupakan output RPJMN yang sama dengan Fasilitas literasi digital namun dengan target untuk tahun 2026-2029. Output ini akan berupa pelaksanaan Training of Trainers (TOT) atau pilot project pelatihan dari tema/modul level literasi digital	RPJMN	Pusat	-	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	-	16,156,800	16,156,800	16,156,800	16,156,800				
		Output - 3. Pelatihan literasi digital	Output ini merupakan output RPJMN yang sama dengan Fasilitas literasi digital namun dengan target untuk tahun 2026-2029. Output ini akan berupa pelaksanaan Training of Trainers (TOT) atau pilot project pelatihan dari tema/modul level literasi digital	RPJMN	Pusat	-	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	-	16,156,800	16,156,800	16,156,800	16,156,800				
IKP 10.1	IKK 1.5	05 - Tingkat pemahaman literasi digital pada kelompok rentan	Output ini merupakan output RPJMN yang sama dengan Fasilitas literasi digital namun dengan target untuk tahun 2026-2029. Output ini akan berupa pelaksanaan Training of Trainers (TOT) atau pilot project pelatihan dari tema/modul level literasi digital	Non RPJMN	Pusat	-	200,000 Orang	200,000 Orang	200,000 Orang	200,000 Orang	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000				
		Output - 4. Fasilitas literasi digital untuk anak	Output ini merupakan output RPJMN yang sama dengan Fasilitas literasi digital namun dengan target untuk tahun 2026-2029. Output ini akan berupa pelaksanaan Training of Trainers (TOT) atau pilot project pelatihan dari tema/modul level literasi digital	Non RPJMN	Pusat	-	200,000 Orang	200,000 Orang	200,000 Orang	200,000 Orang	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000				
		Output - 5. Fasilitas literasi digital untuk kelompok rentan	Output ini merupakan output RPJMN yang sama dengan Fasilitas literasi digital namun dengan target untuk tahun 2026-2029. Output ini akan berupa pelaksanaan Training of Trainers (TOT) atau pilot project pelatihan dari tema/modul level literasi digital	Non RPJMN	Pusat	-	200,000 Orang	200,000 Orang	200,000 Orang	200,000 Orang	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000				
		Output - 6. Fasilitas literasi digital untuk kelompok rentan	Output ini merupakan output RPJMN yang sama dengan Fasilitas literasi digital namun dengan target untuk tahun 2026-2029. Output ini akan berupa pelaksanaan Training of Trainers (TOT) atau pilot project pelatihan dari tema/modul level literasi digital	Non RPJMN	Pusat	-	200,000 Orang	200,000 Orang	200,000 Orang	200,000 Orang	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000				

KEGIATAN 7657 - Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Komdigi																		41,290,276	48,665,671	50,610,660	54,777,897	
SP 8	SK 1	01 - Mewujudkan transformasi pendidikan tinggi bidang komdigi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja																25,186,526	32,875,526	34,670,515	38,837,752	
IKP 8.1	IKK 1.1	01 - Persentase (%) masa tunggu lulusan yang bekerja atau studi lanjut dalam waktu 6 bulan setelah wisuda	Non RPJMN	-		52%	52%	55%	60%	65%	-	-	-	-	-							
IKP 8.2	IKK 1.2	02 - Persentase peserta sertifikasi bidang Komdigi yang bertalenta digital Rumus perhitungan: Jumlah peserta sertifikasi bidang komdigi yg bertalenta digital/total jumlah peserta sertifikasi bidang komdigi x 100%	RPJMN	Baseline 97,15%		97,15%	97,15%	97,15%	97,15%	97,15%												
IKP 8.2	IKK 1.3	03 - Persentase (%) Penelitian yg dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi Rumus perhitungan: Jumlah penelitian yg dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional/Total jumlah penelitian yang dilaksanakan dosen tetap x 100%	Non RPJMN			40%	45%	50%	55%	60%												
IKP 8.2	IKK 1.4	04 - Presentase (%) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yg menghasilkan Inovasi dan melibatkan Mahasiswa Rumus perhitungan: Jumlah PKM yg menghasilkan inovasi dan melibatkan mahasiswa/Total jumlah seluruh PKM x 100%	Non RPJMN			40%	45%	50%	55%	60%												
		Output - 1. Pelatihan Bidang Komdigi	RPJMN	Yogyakarta	-	500 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	807,380	1,614,760	1,614,760	1,614,760	1,614,760							
		Output - 2. Peralatan dan Fasilitas Pengembangan Kependidikan Perguruan Tinggi Bidang Komdigi	Non RPJMN	Yogyakarta	-	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	18,918,859	18,918,859	26,458,650	27,781,582	31,948,819							
		Output - 3. Peningkatan karir dosen	Non RPJMN	Yogyakarta	-	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	1,224,168	1,263,914	1,285,376	1,413,913	1,413,913							
		Output - 4. Akreditasi program studi pada perguruan tinggi Kementerian Komdigi	Non RPJMN	Yogyakarta	-	-	1 Unit kerja	1 Unit kerja	1 Unit kerja	1 Unit kerja	-	1,666,460	1,666,460	1,875,960	1,875,960							
		Output - 6. Pengabdian masyarakat bidang komdigi	Non RPJMN	Yogyakarta	-	-	58 Orang	76 Orang	76 Orang	76 Orang	-	843,473	1,105,240	1,105,240	1,105,240							
		Output - 7. Kerjasama kampus dengan industri digital	Non RPJMN	Yogyakarta	-	-	3 Kesepakata n	3 Kesepakata n	4 Kesepakata n	5 Kesepakata n	-	879,060	745,040	879,060	879,060							
IKP 11.1	IKK 4.1	02 - Mendorong layanan publik bidang talenta digital																16,103,750	15,790,145	15,940,145	15,940,145	
IKP 11.1	IKK 4.2	01 - Persentase (%) realisasi target PNBP Perguruan Tinggi bidang Komdigi Rumus perhitungan: Jumlah pendapatan PNBP/Target PNBP x 100%	Non RPJMN	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-							
		Output - 1. Peserta didik perguruan tinggi bidang komdigi	Non RPJMN	Yogyakarta	-	2.454 Orang	2.104 Orang	2.104 Orang	2.104 Orang	2.104 Orang	2,389,738	17,838,000	16,103,750	15,790,145	15,940,145	15,940,145						

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BPSDM KOMDIGI 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	Definisi	RPJMN/ NON RPJMN	LOKASI RO	Baseline	TARGET					ALOKASI (dalam ribu rupiah)					SATUAN KERJA PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Dukungan Manajemen																	
KEGIATA 4485-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital													269,881,376	226,022,495	237,296,829	249,261,671	
SP 1	SK 1	Meningkatnya kualitas tata kelola BPSDM Komdigi yang efektif dan efisien											228,145,048	182,199,351	191,282,528	200,946,655	
IKP 1.14	IKK 1.1	01-Nilai Akuntabilitas Kinerja BPSDM Komdigi	Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPSDM yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP BPSDM. Evaluasi internal (APIP) dengan menghitung bobot perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi	Non RPJMN	-		74,8	75,7	76,7	77,7	78,7	-	-	-	-	Sekretariat BPSDM Komdigi	
IKP 1.14	IKK 1.2	02-Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi	Nilai dimaksud adalah nilai yang mencerminkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di BPSDM meliputi unsur sebagai berikut: 1) SPIP; 2) MRI; 3) IEPK; dan 4) Kapabilitas APIP. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen.	Non RPJMN	-		3,01	3,1	3,19	3,28	3,38	-	-	-	-	Sekretariat BPSDM Komdigi	
IKP 1.14	IKK 1.3	03-Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi	Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di BPSDM. Penilaian atas kinerja anggaran BPSDM yang dilakukan oleh Kementerian Indikator ini merupakan output dari penilaian Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) BPSDM Komdigi	Non RPJMN	-		93,98	94,1	94,27	94,41	94,56	-	-	-	-	Sekretariat BPSDM Komdigi	
IKP 1.14	IKK 1.4	04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) BPSDM Komdigi	Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: • Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan	Non RPJMN	-		95	95	95	95	95	-	-	-	-	Sekretariat BPSDM Komdigi	
IKP 1.14	IKK 1.5	05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSDM Komdigi	Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian di level UAKPA Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: • Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang	Non RPJMN	-		97	97	97	97	97	-	-	-	-	Sekretariat BPSDM Komdigi	
IKP 1.14	IKK 1.6	01-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM		Non RPJMN			1	1	1	1	1					Sekretariat BPSDM Komdigi	
IKP 1.14	IKK 1.7	06-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi	Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian	Non RPJMN	-		70	70	70	70	70	-	-	-	-	Sekretariat BPSDM Komdigi	
IKP 1.14	IKK 1.8	07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di BPSDM Komdigi	Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun	Non RPJMN	-		30	30	30	30	30	-	-	-	-	Sekretariat BPSDM Komdigi	
IKP 1.14	IKK 1.9	08-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi	Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang mencerminkan kepuasan seluruh pegawai terhadap layanan sekretariat Ditjen Komunikasi Publik dan Media yang diberikan. Penilaian dilakukan melalui survei dengan skala yang ditetapkan	Non RPJMN	-		4,08	4,16	4,25	4,33	4,42		-	-	-	Sekretariat BPSDM Komdigi	
IKP 1.14	IKK 1.10	09-Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kerjasama bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital		Non RPJMN			100	100	100	100	100					Sekretariat BPSDM Komdigi	
		001 - Kerjasama BPSDM Komdigi dengan Mitra		Non RPJMN			25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	960,000	1,030,000	1,116,000	1,145,000	1,202,250	
		951 - Layanan Sarana Internal		Non RPJMN			52 Unit	56 Unit	56 Unit	56 Unit	56 Unit	4,607,489	59,083,278	4,650,000	4,882,500	5,126,625	

		952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Non RPJMN			11 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1,373,810	1,442,500	1,514,626	1,590,356	1,669,876	Sekretariat BPSDM Komdigi
		953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Non RPJMN			15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	1,185,532	1,244,808	1,307,050	1,372,402	1,441,023	Sekretariat BPSDM Komdigi
		954 - Layanan Manajemen SDM		Non RPJMN			478 Orang	467 Orang	467 Orang	467 Orang	467 Orang	4,332,910	4,549,556	4,777,033	5,015,886	5,266,679	Sekretariat BPSDM Komdigi
		955 - Layanan Manajemen Keuangan		Non RPJMN			24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	2,019,050	2,120,003	2,226,003	2,337,303	2,454,168	Sekretariat BPSDM Komdigi
		956 - Layanan BMN		Non RPJMN			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	281,794	295,883	310,667	326,211	342,522	Sekretariat BPSDM Komdigi
		960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Non RPJMN			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	587,384	616,753	647,590	679,970	713,968	Sekretariat BPSDM Komdigi
		962 - Layanan Umum		Non RPJMN			2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2,653,734	2,786,420	2,925,742	3,072,029	3,325,630	Sekretariat BPSDM Komdigi
		971 - Layanan Prasarana Internal		Non RPJMN			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	506,974	532,323	558,939	586,886	616,230	Sekretariat BPSDM Komdigi
		974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Non RPJMN			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	404,708	424,943	446,191	468,500	491,925	Sekretariat BPSDM Komdigi
		994 - Layanan Perkantoran		Non RPJMN			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	126,732,919	154,018,581	161,719,510	169,805,485	178,295,759	Sekretariat BPSDM Komdigi
KEGIATAN 6995-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Pendidikan Tinggi																	
SP 1	SK 2	01-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STMM yang Bersih dan Efisien										39,748,883	41,736,328	43,823,144	46,014,301	48,315,016	
IKP 1.14	IKK 2.1	01-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil BPK di STMM	Indikator ini merupakan tolak ukur materialitas temuan pemeriksaan BPK yang berakibat terhadap opini dari BPK. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah nilai temuan/rekomendasi STMM dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Persentase tindak lanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan	Non RPJMN	-		1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	STMM
IKP 1.14	IKK 2.2	02- Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di STMM pada	Persentase tindak lanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan	Non RPJMN	-		70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	STMM
IKP 1.14	IKK 2.3	03-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di STMM pada	Persentase tindak lanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan	Non RPJMN	-		30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	STMM
IKP 1.14	IKK 2.4	04-Nilai Kinerja Anggaran STMM	Penilaian atas kinerja anggaran BPSDM yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di BPSDM. Penilaian atas kinerja anggaran BPSDM yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di BPSDM.	Non RPJMN	-		88	88	88	88	88	-	-	-	-	-	STMM
IKP 1.14	IKK 2.5	05-Persentase (%) Pegawai/SDM Internal yang Difasilitasi Peningkatan Kompetensi di STMM	Pegawai internal STMM (ASN) yang menjadi peserta kegiatan pengembangan kompetensi (workshop, sosialisasi, seminar, bimtek, diklat, dan capacity building) pada tahun n minimal 90% dari	Non RPJMN	-		90	90	90	90	90	-	-	-	-	-	STMM
IKP 1.14	IKK 2.6	06-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) STMM	Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian di level UAKPA Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: • Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang	Non RPJMN	-		80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	STMM
		952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Non RPJMN			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	252,435	265,057	278,310	292,225	306,836	STMM
		953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Non RPJMN			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	177,160	186,018	195,319	205,085	215,339	STMM
		954 - Layanan Manajemen SDM		Non RPJMN			182 Orang	182 Orang	182 Orang	182 Orang	182 Orang	3,427,672	3,599,056	3,779,008	3,967,959	4,166,357	STMM
		962 - Layanan Umum		Non RPJMN			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	120,000	126,000	132,300	138,915	145,861	STMM
		994 - Layanan Perkantoran		Non RPJMN			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	35,771,616	37,560,197	39,438,207	41,410,117	43,480,623	STMM

Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Badan Pengembangan SDM Komdigi 2025-2029

Level	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)	TARGET					ALOKASI APEN (dalam juta rupiah)					ALOKASI NON-APEN (dalam juta rupiah)					TOTAL (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PN	01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)																						
PP	02 - Penguatan Komunikasi Publik dan Media																						
KP	02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik		Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital					158,452,508	198,086,776	198,369,412	198,369,412	198,369,412	0	0	0	0	0	158,452,508	198,086,776	198,369,412	198,369,412	198,369,412	
ProP	03 - Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Bertalenta Digital							158,452,508	198,086,776	198,369,412	198,369,412	198,369,412	0	0	0	0	0	158,452,508	198,086,776	198,369,412	198,369,412	198,369,412	
RO	02.14.001.001 - Pemberdayaan Talenta Digital	Jumlah peserta pemberdayaan talenta digital	-	1.500 orang	1.500 orang	1.500 orang	1.500 orang	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
RO	01.02.02.03 - Pelatihan Keterampilan Digital Dasar	Jumlah peserta pelatihan keterampilan digital dasar	-	100.000 orang	100.000 orang	100.000 orang	100.000 orang	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RO	01.02.02.03 - Pelatihan Talenta Digital	Jumlah peserta pelatihan talenta digital	-	53.240 orang	53.240 orang	53.240 orang	53.240 orang	61,975,255	61,975,255	61,975,255	61,975,255	61,975,255	0	0	0	0	0	61,975,255	61,975,255	61,975,255	61,975,255	61,975,255	
RO	01.02.02.03 - Pelatihan Aparatur Digital	Jumlah peserta pelatihan aparatur digital	-	20.000 orang	20.000 orang	20.000 orang	20.000 orang	0	44,433,954	44,433,954	44,433,954	44,433,954	0	0	0	0	0	44,433,954	44,433,954	44,433,954	44,433,954	44,433,954	
RO	01.02.02.03 - Digital Talent Scholarship	Jumlah peserta pelatihan Digital Talent Scholarship	33.500 orang	-	-	-	-	70,056,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,056,894	0	0	0	0	
RO	01.02.02.03 - Pelatihan Kepemimpinan Nasional bidang Digital	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional	100 orang	160 orang	160 orang	160 orang	160 orang	5,382,322	6,516,246	6,516,246	6,516,246	6,516,246	0	0	0	0	0	5,382,322	6,516,246	6,516,246	6,516,246	6,516,246	
RO	01.02.02.03 - Pelatihan Bidang Komdigi	Jumlah peserta sertifikasi berbasis SKKNI bidang komdigi	500 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	80,738	1,332,124	1,614,760	1,614,760	1,614,760	0	0	0	0	0	80,738	1,332,124	1,614,760	1,614,760	1,614,760	
RO	01.02.02.03 - Pelatihan berbasis SKKNI bidang Komdigi	Jumlah peserta sertifikasi berbasis SKKNI bidang komdigi	-	25.000 orang	25.000 orang	25.000 orang	25.000 orang	0	83,829,197	83,829,197	83,829,197	83,829,197	0	0	0	0	0	0	83,829,197	83,829,197	83,829,197	83,829,197	
RO	01.02.02.03 - Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah peserta pelatihan bidang komunikasi dan informatika	6,000 orang	-	-	-	-	20,957,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,957,299	0	0	0	0	
PN	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru																						
PP	14 - Ekonomi Digital																						
KP	01 - Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital		01 - Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif) 02 - Proporsi remaja dan dewasa Usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK)					78,896,629	78,896,629	78,896,629	78,896,629	78,896,629	0	0	0	0	0	78,896,629	78,896,629	78,896,629	78,896,629	78,896,629	
ProP	001 - Pengembangan SDM Digital dan Digitalisasi Masyarakat							78,896,629	78,896,629	78,896,629	78,896,629	78,896,629	0	0	0	0	0	78,896,629	78,896,629	78,896,629	78,896,629	78,896,629	
RO	02.14.01.001 - Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Digital	- Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan digital angkatan baru - Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan digital angkatan berjalan	703 orang	703 orang	703 orang	703 orang	703 orang	78,896,629	78,896,629	78,896,629	78,896,629	78,896,629	0	0	0	0	0	78,896,629	78,896,629	78,896,629	78,896,629	78,896,629	
RO	01.02.02.03 - Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Jumlah data hasil pengukuran IMDI	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	6,030,042	7,799,698	7,799,698	8,579,667	8,579,667	0	0	0	0	0	6,030,042	7,799,698	7,799,698	8,579,667	8,579,667	
PN	03- Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, Mengembangkan industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui peran aktif koperasi																						
PP	02- Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik																						
KP	02- Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Masyarakat																						
ProP	02- Peningkatan Layanan Masyarakat dan Pemanfaatan Ruang Digital																						
RO	01.01.02.02 - Fasilitas Literasi Digital	Jumlah peserta fasilitas literasi digital	300 orang	-	-	-	-	14,688,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,688,000	0	0	0	0	
RO	02.14.001.001 - Pelatihan Literasi Digital	Jumlah peserta pelatihan literasi digital	-	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	0	14,688,000	14,688,000	14,688,000	14,688,000	0	0	0	0	0	0	14,688,000	14,688,000	14,688,000	14,688,000	
RO	03-02.02.002- OM Sistem informasi Pengembangan SDM Digital Nasional	Jumlah output terkait operasional pemeliharaan aplikasi Platform SDM Digital	14 unit	14 unit	15 unit	16 unit	17 unit	6,957,040	10,205,821	10,205,821	11,226,403	11,226,403	0	0	0	0	0	6,957,040	10,205,821	10,205,821	11,226,403	11,226,403	
PN	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas																						
PP	19 - Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan																						
KP	03 - Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi Ketenagakerjaan		03 - Pilar literasi digital pada IMDI					0	88,500,000	88,500,000	88,500,000	88,500,000	0	0	0	0	0	0	88,500,000	88,500,000	88,500,000	88,500,000	
ProP	001-Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemajuan Kewirausahaan Perempuan		191060																				
RO	04.19.03.001-Fasilitasi Literasi Digital untuk kelompok rentan	Jumlah peserta pelatihan literasi digital kelompok rentan	0	200.000 Orang	200.000 Orang	200.000 Orang	200.000 Orang	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	

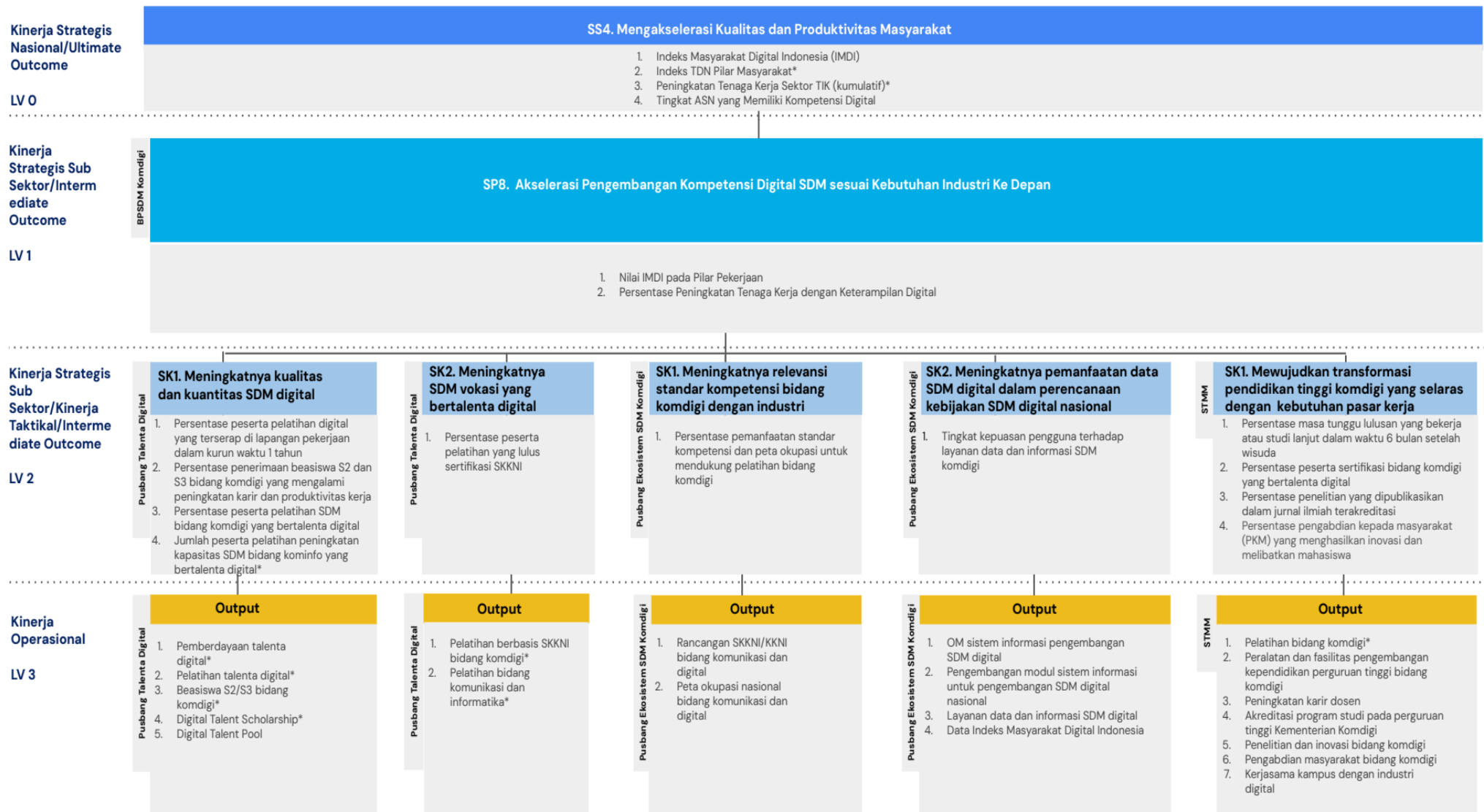
Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi Renstra Badan Pengembangan SDM Komdigi 2025-2029 1/1

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital					
1	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Corporate University Kementerian Komunikasi dan Digital	<p>* Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi dan dilakukan melalui sistem pembelajaran secara terintegrasi</p> <p>* Pasal 203 ayat (4a) PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, pengembangan kompetensi bagi PNS dilaksanakan melalui pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University)</p> <p>* Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University)</p> <p>Berdasarkan regulasi tersebut belum ada pedoman pelaksanaan corporate university di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai sarana sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi.</p>	BPSDM Komdigi (Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi)	Lembaga Administrasi Negara	<p>2026: Penyusunan Kajian/Naskah Urgensi.</p> <p>2027: Penyusunan dan penetapan RPM</p>
2	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital	Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Komdigi dengan penajaman tugas dan fungsi terkait pelatihan dan pengembangan SDM bidang komdigi, yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	<p>- Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi</p> <p>- seluruh Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di Badan Pengembangan SDM Komdigi</p> <p>- Kementerian PANRB</p>	2025

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Badan Pengembangan SDM Komdigi 2025-2029 1/2

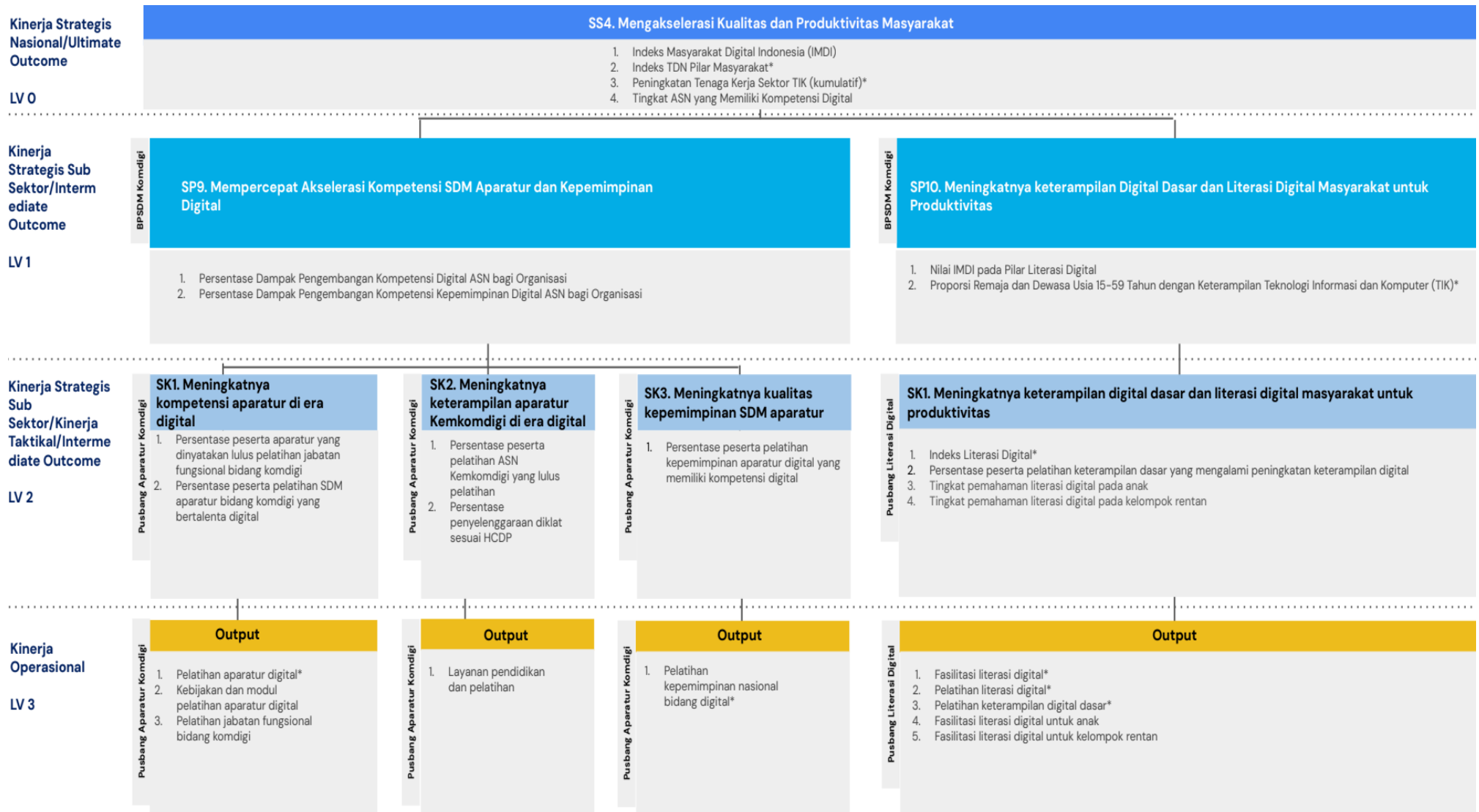
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika					
1	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk Pengembangan SKKNI Bidang Komdigi	Belum ada peta jalan atau rencana induk resmi yang ditetapkan oleh instansi teknis pembina sektor kominfo mengenai pengembangan SKKNI di bidang Komdigi secara keseluruhan	BPSDM Komdigi (Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi)	Internal: Seluruh UK Komdigi, Kemenaker	2025
2	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi	Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Kominfo terbitan tahun 2025	BPSDM Komdigi (Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi)	Kemenaker	2025
3	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi	Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2026	BPSDM Komdigi (Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi)	Kemenaker	2026
4	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi	Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2027	BPSDM Komdigi (Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi)	Kemenaker	2027
5	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi	Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2028	BPSDM Komdigi (Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi)	Kemenaker	2028
6	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi	Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2029	BPSDM Komdigi (Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi)	Kemenaker	2029

Lampiran 4: Pohon Kinerja Badan Pengembangan SDM Komdigi 2025-2029 1/1



Keterangan:
* = Amanat RPJMN

Pohon Kinerja Badan Pengembangan SDM Komdigi 2025-2029 1/2



Keterangan:

* = Amanat RPJMN

Pohon Kinerja Badan Pengembangan SDM Komdigi 2025-2029 1/3

Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome

SS7. Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi

1. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi
2. Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNPB Kemenkomdigi

LV 0

Kinerja Strategis Sub Sektor/Intermediate Outcome

BPSDM Komdigi

SP11. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang SDM Digital

1. Persentase Realisasi Penerimaan PNPB Bidang Talenta Digital

LV 1

Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Intermediate Outcome

Pusbang Aparatur Komdigi

SK4. Mendorong Layanan Publik Bidang ASN Digital

1. Persentase realisasi target PNPB Pusbang Aparatur Komdigi
2. Persentase realisasi target PNPB BPPTIK

LV 2

STMM

SK2. Mendorong Layanan Publik Bidang Talenta Digital

1. Persentase realisasi target PNPB perguruan tinggi bidang komdigi

Kinerja Operasional

Pusbang Aparatur Komdigi

Output

1. Pelatihan aparatur digital skema pembiayaan PNPB

LV 3I

STMM

Output

1. Peserta didik perguruan tinggi bidang komdigi

Keterangan:
* = Amanat RPJMN